

**IMPLEMENTASI *ASSET PROTECTION LENDING RATIONALE*
DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
(Studi PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung)**

Skripsi

**SASKIA HANUM PRATIWI
NPM 1651020297**



Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

**IMPLEMENTASI *ASSET PROTECTION LENDING*
RATIONALE DALAM MEMINIMALISIR RISIKO
PEMBIAYAAN
(Studi PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Sarjana
Ekonomi (S.E)

Oleh

**SASKIA HANUM PRATIWI
NPM 1651020297**

Jurusan : Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Dr. Heni Noviarita, M. Si.
Pembimbing II : M. Yusuf Bahtiar, M. E.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Dari berbagai kategori pembiayaan segmen *business banking* yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya ialah *asset protection lending* yaitu pembiayaan dengan skala besar yang permanen namun menggunakan fasilitas jangka pendek. *Asset protection lending rationale* merupakan pemikiran bank untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya. Penerapan *asset protection lending rationale* pada segmen *business banking* terlebih pada pembiayaan modal kerja permanen diharapkan agar bank syariah dapat memastikan proses dan jalannya pembiayaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah dalam meminimalisir risiko tanpa ada masalah terkhusus terjadinya pembiayaan macet

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1). Bagaimana implementasi *asset protection lending rationale* dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung?, 2). Bagaimana penerapan *asset protection lending rationale* pada perbankan syariah dalam perspektif Islam?. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis mengambil data dari wawancara dengan Manajer *Business Banking* PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung, untuk melihat implementasi dari konsep *asset protection lending rationale* pada analisis pembiayaan modal kerja *revolving* dan *evergreen* segmen *business banking*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu melakukan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data yang diperoleh dan menyimpulkan serta memverifikasi hasil yang didapat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung dalam mengimplementasikan konsep *asset protection lending rationale* sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dalam implementasinya *asset protection lending rationale* tetap menggunakan prinsip 5C, akan tetapi ada pengembangan terkait analisis untuk pembiayaan *asset protection lending* yaitu RAC dimana pengembangan tersebut terfokus pada risiko dan mitigasi. PT. Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung dalam mengimplementasikan *asset protection lending rationale* dinilai telah sesuai dengan prinsip syariah. Analisis yang dilakukan bank sebelum memberikan pembiayaan memperhatikan, usaha nasabah terbebas dari barang *non-halal*, terhindar dari *riba*, *maisir*, *gharar*, serta melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai etika bisnis Islam.

Kata kunci: *Asset Protection Lending Rationale, Risiko Pembiayaan, Business Banking*

ABSTRACT

From the various categories of financing for thesegment business banking carried out by Islamic banks, one of them is asset protection lending, namely permanent large-scale financing but using short-term facilities. The asset protection lending ratio is a bank's idea to assess the ability of customers to repay their loans. The application of the asset protection lending rationale in thesegment, business banking especially in permanent working capital financing, is expected so that Islamic banks can ensure that the process and course of financing runs well in minimizing risks without any problems, especially the occurrence of bad financing..

The problem formulation of this research is: 1). How to implement asset protection lending rationale in minimizing financing risk at PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung?, 2). How is the application of the asset protection lending rationale in Islamic banking in an Islamic perspective?. This study uses a qualitative descriptive approach. The author takes data from interviews with the Manager of Business Banking PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung, to see the implementation of the concept of asset protection lending rationale in the analysis of working capital financing revolving and evergreen segments business banking. The data analysis technique used in this research is data analysis technique from Miles and Huberman, namely collecting data, reducing data, presenting the data obtained and concluding and verifying the results obtained.

The results of the analysis show that PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung in implementing the concept of asset protection lending rationale before providing financing to customers. In its implementation, the asset protection lending rationale continues to use the 5C principle, but there is a development related to the analysis for financing asset protection lending, namely RAC where the development focuses on risk and mitigation. PT. Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung in implementing the asset protection lending rationale is considered to have complied with sharia principles. This can be seen from the analysis carried out by the bank before providing financing, paying attention to whether the customer's business is free from goods non-halal, the profit-sharing process is free from usury, maisir, gharar, and implements the precautionary principle in accordance with Islamic business ethics.

Keywords: Asset Protection Lending Rationale, Financing Risk, Business Banking

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Implementasi Asset Protection Lending Rationale dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung)**”.

Nama : Saskia Hanum Pratiwi

NPM : 1651020297

Jurusan : Perbankan Syariah

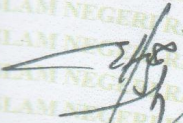
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


DR. Hj. Heni Noviarita, S.H., M.Si

NIP. 19651120199203002


M. Yusuf Bahtiar, M.E

NIP. 198912082018011001

Ketua Jurusan,


DR. Erike Anggraeni, M.E

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721)703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI ASSET PROTECTION LENDING RATIONALE DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIYAAAN (Studi PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung)"** disusun oleh **Saskia Hanum Pratiwi, NPM: 1651020297**, Jurusan: **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin/ 06 September 2021**

TIM PENGUJI

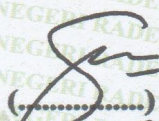
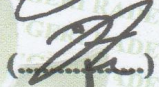
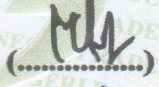
Ketua : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

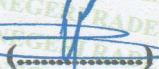
Sekretaris : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I.,M.E.Sy

Penguji I : Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy

Penguji II : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E.,M.Si.

Penguji III : M. Yusuf Bahtiar, M.E.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si

NIP.198008012003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S Al-Anfal Ayat 27)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa penulis persembahkan Skripsi ini sebagai rasa Terima Kasih yang sebesar-besarnya dan bentuk kasih sayang penulis kepada:

1. Kedua orang tuaku yang selalu mendukung dan menyemangatiku, Bapak Endang Syarifudin dan Ibu Tuti Handayani.
2. Teruntuk Adikku tercinta Kintan Gading Cempaka yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepadaku dalam menulis skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung. Tempatku menimba ilmu-ilmu yang rabbani. Semoga semakin maju, berjaya, sukses dan berkualitas.



RIWAYAT HIDUP

Saskia Hanum Pratiwi lahir di kota Bandar Lampung 09 Oktober 1998. Anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Endang Syarifudin dan Ibu Tuti Handayani Selama 18 tahun penulis telah menempuh pendidikan mulai dari:

1. Taman Kanak-Kanak Islam Tepadu (TK IT) Aziziyah pada tahun 2003 s.d 2004
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tanjung Agung pada tahun 2004 s.d 2010
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nusantara pada tahun 2010 s.d 2013
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Padang Panjang pada tahun 2013 s.d 2016
5. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sarjana di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) mengambil Program Studi Perbankan Syariah sejak tahun 2016 dan telah menyelesaikan studi pada tahun 2021



KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkah, hidayah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Asset Protection Lending Rationale dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung)”** dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikut setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Atas bantuan semua pihak dalam proses menyelesaikan skripsi ini, lupa dihaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghafur, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Heni Noviarita, M. Si., selaku dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sekaligus Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan serta membimbing dalam penelitian ini.
4. Bapak M. Yusuf Bahtiar, M. E., selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan motivasi dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan

masuk, arahan serta membimbing dalam penelitian ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu, informasi dan segala urusan kampus.
6. Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini dan Segenap Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua dan adik tercinta yang tidak pernah melepaskan do'a dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberi kesehatan, kasih sayang serta ridha-Nya kepada mereka.
8. Sahabat yang telah menjadi keluargaku, menemaniiku selama ini dibangku perkuliahan Asri Taskia Putri, Filosovia dan Hesti Pramaisela. Yang selalu menjadi kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar dan pundak untuk bersandar. Yang selalu menciptakan canda tawa dan pengertian. Yang selalu mendukung dan memotivasiku untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan UKM-F RISEF dan terkhusus Devisi *Research and Development* yang telah banyak memberikan pengalaman, pembelajaran dan berjuang bersama dalam meraih cita.
10. Teman-teman seperjuangan seluruh mahasiswa dan mahasiswi Perbankan Syariah 2016 dan terkhusus kepada Perbankan Syariah kelas D yang telah berjuang bersama meraih cita.
11. Seluruh pihak-pihak dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempatku menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Semoga karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Perbankan Syariah. Penulis berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.



Bandar Lampung, 2021

Penulis

Saskia Hanum Pratiwi

1651020297

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Identifikasi Masalah	10
E. Fokus Penelitian	11
F. Rumusan Masalah	11
G. Tujuan Penelitian.....	11
H. Manfaat Penelitian.....	12
I. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
J. Metodologi Penelitian	17
K. Kerangka Berfikir.....	26

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah	
1. Definisi Bank Syariah.....	29
2. Sejarah Bank Syariah	30
3. Falsafah Operasional Bank Syariah.....	32
4. Sistem Operasional Bank Syariah	33
B. Pembiayaan Bank Syariah	
1. Definisi Pembiayaan.....	35
2. Jenis-Jenis Pembiayaan	36
3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	38
4. Falsafah Pembiayaan di Bank Syariah	40
C. <i>Bussiness Banking</i>	
1. Definisi <i>Bussiness Banking</i>	41
2. Jenis Pembiayaan <i>Bussiness Banking</i>	42
D. Menyusun Kredit.....	43
E. <i>Lending Rationale</i>	
1. Definisi <i>Lending Rationale</i>	45
2. Tujuan <i>Lending Rationale</i>	46
3. Jenis-jenis <i>Lending Rationale</i>	46
4. Perbedaan ACL, APL, dan CFL	49
F. <i>Asset Protection Lending Rationale</i>	
1. Definisi APL.....	50
2. Karakteristik APLR	53
3. Waktu dan Tepat dalam Memberikan Pembiayaan Berdasarkan APLR	55
4. Macam-macam Pembiayaan APLR	56
5. Keistimewaan APLR	57
G. Dasar Hukum APLR	58
H. Risiko Perbankan Syariah	
1. Definisi Risiko.....	71
2. Identifikasi Risiko	72
3. Antisipasi Risiko Kredit	73
4. Perbankan dan Pengelolaan Resiko.....	74

H. Implementasi APLR pada Pembiayaan	
1. Analisis 5C dan 7P.....	76
2. Standar APLR di Bank Syariah	79
3. Tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Standar APLR di Bank Syariah	84

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BSM KC Diponegoro Bandar Lampung	
1. Sejarah Pendirian dan Perkembangan BSM	87
2. Alamat BSM KC Diponegoro Bandar Lampung	90
3. Visi dan Misi BSM KC Diponegoro Bandar Lampung.....	90
4. Budaya Pembiayaan BSM KC Diponegoro Bandar Lampung.....	91
5. Struktur Organisasi BSM KC Diponegoro Bandar Lampung.....	92
B. Produk BSM KC Diponegoro Bandar Lampung.....	93
C. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	
1. Pembiayaan APL BSM KC Diponegoro Bandar Lampung	94
2. Alur Pembiayaan <i>Asset Protection Lending</i>	95
3. Kendala-kendala dalam Penerapan APLR	98
4. Mitigasi Risiko APLR	99

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi APLR dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung	102
B. Penerapan <i>Asset Protection Lending Rationale</i> pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Islam	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 127

B. Saran..... 12

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1 NPF BUS di Indonesia 2015-2020	5
Tabel 2 NPF BSM 2015-2020.....	6
Tabel 3 Jenis Pembiayaan <i>Business Banking</i>	42
Tabel 4 <i>Asset Conversion Lending, Asset Protection Lending Rationale, Cash Flow Lending</i>	49
Tabel 5 Contoh Kasus APLR	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Analisis Data	24
Gambar 2 Kerangka Berfikir	26
Gambar 3 Struktur Organisasi BSM KC Diponegoro.....	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi Wanwancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, peneliti akan menegaskan beberapa kata dan istilah yang dipergunakan dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “**Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung)**”.

1. Implementasi

Implementasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pelaksanaan, penerapan.¹ Jadi pengertian implementasi penerapan dari *Asset Protection Lending Rationale*.

2. *Asset Protection Lending Rationale*

Asset Protection Lending Rationale adalah dasar pemikiran pembiayaan dengan skala besar yang permanen namun menggunakan fasilitas jangka pendek. Kebutuhan permanen ini umumnya berhubungan dengan suatu tingkat kebutuhan modal kerja. Jadi *Asset Protection Lending* memadukan karakteristik *Asset Conversion Lending* (fasilitas jangka pendek) dengan *Cash Flow Lending* (kebutuhan permanen) menjadi suatu bentuk pinjaman yang berbeda dengan *Asset Conversion Lending* (ACL) dimana kebutuhan pinjaman bersifat sementara dan pelunasan berasal dari selesainya *AC Cycle*, APL merupakan pendanaan dari *AC Cycle* yang berulang-ulang secara permanen terus-menerus.²

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 427.

²Alfianila, Rully, T., Rifqy, T., “Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* Pada Pembiayaan Korporasi Di Bank Syariah”, Vol.4 No 1, 2018, h. 7.

3. Risiko

Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.³

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun.⁴

Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan “Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung)” adalah suatu rasio yang ditetapkan bank dalam menilai kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan, dan dapat mempengaruhi besar kecilnya risiko pembiayaan nantinya di segmen *Business Banking*.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Bagi penulis pentingnya meneliti masalah yang akan diteliti terkait dengan judul skripsi ini, karena pembiayaan merupakan salah satu cara yang dilakukan bank dalam menjalankan bisnisnya agar terus berlangsung, sebagian besar pendapatan Bank yaitu dari sektor pembiayaan, akan tetapi adanya risiko yang akan di tanggung oleh bank pada pembiayaan terkhusus pada segmen *business banking*, mengingat jumlah yang diberikan tidak sedikit, ini berarti risiko yang ditanggung bank sangat besar dan dapat mempengaruhi jalannya bisnis bank kedepannya, maka hal ini menjadi alasan penulis mengambil judul “**Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung)**” yang diharapkan

³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 488.

⁴Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 41.

judul ini mampu mengetahui bagaimana implementasi *Asset Protection Lending Rationale* dalam meminimalisir risiko pembiayaan di Bank Mandiri Syariah KC Diponegoro Bandar Lampung.

2. Secara Subjektif

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan spesifikasi keilmuan penulis yaitu pada jurusan Perbankan Syariah, serta diperkuat dengan referensi, media cetak, maupun media elektronik lainnya. Maju atau berkembangnya suatu sektor jasa keuangan yaitu perbankan salah satunya adalah dengan melihat jumlah kelancaraan pembiayaan yang diberikan oleh debitur. Sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Definisi bank menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan, lembaga keuangan menurut undang-undang tersebut ialah, semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.⁵ Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan aktivitas perbankan yang dijalankan berdasarkan hukum Islam. Kegiatan perbankan dan aktivitasnya dijalankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI). Bank syariah atau bank Islam merupakan lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali

⁵Thomas Suyanto, dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1999), h. 3.

kepada masyarakat yang memerlukannya dalam bentuk pembiayaan.⁶

Perkembangan perbankan syariah di era reformasi ditandai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan diimplementasikan oleh bank syariah. Pengertian bank syariah dalam pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bagi masyarakat kota maupun desa bank sudah bukan merupakan sesuatu yang asing lagi. Bank sudah menjadi mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan. Dari menjadikan bank sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Sumber pendapatan bank didapat dari pembiayaan jasa-jasa atau produk-produk yang diberikan oleh bank, berupa hasil usaha dari pembiayaan pengadaan barang *al-murahabah*, *al-bai biisanan ajil*, dan *al-ijarah* berupa *mark-up* dan sewa, dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi, dan dari penggunaan fasilitas berupa *fee*. Penghasilan bank terbesar didapat dari bagi hasil atau *margin* yang diperoleh dari pembiayaan bank.

Pembiayaan merupakan pengadaan uang atau tagihan yang sejenis dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan di antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan individu tersebut yang diberikan dana untuk membayar kembali tagihan tersebut sampai jangka waktu yang sudah ditentukan dengan bagi hasil sebagai *feedback*.⁷ Pembiayaan merupakan penghasil aktiva produktif terbesar bagi sebuah bank. Namun pembiayaan juga mempunyai risiko yang tinggi yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Salah satu permasalahan yang muncul adalah

⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, edisi revisi* (Jakarta: PT .Raja grafindo persada, 2008), h. 56.

pembiayaan macet dimana dana yang disalurkan kepada nasabah tidak dapat ditagih kembali sehingga mengancam likuidasi bank.

Tabel 1
NPF BUS di Indonesia 2015-2020
(Dalam persen)

Tahun	NPF (%)
2015	4,84
2016	4,42
2017	4,81
2018	4,27
2019	3,49
2020	3,32

Sumber : SPS OJK

Dari tabel diatas, pada tahun 2016 *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2018-2020 *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan terus menerus, ini menunjukan *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Umum Syariah selalu mengalami perubahan naik-turun, terlihat pergerakan pembiayaan pada tahun 2015-2020.

Pembiayaan di bank syariah dibagi beberapa jenis pembiayaan yaitu : segi kegunaan, segi tujuan, segi jangka waktu, segi jaminan. Salah satu pembiayaan yang disalurkan bank syariah berada di segmen *retail banking* adalah prioritas dan fokus bisnis Bank yang meliputi segmentasi *micro*, *bussiness banking* dan *consumer* termasuk di dalamnya pembiayaan griya, otomotif, implan, dan gadai serta cicil emas. Fokus pengelolaan segmen usaha *retail banking* adalah penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada individu dengan skala mikro, produk dan jasa lainnya kepada nasabah individu seperti dana pihak ketiga, transaksi pembayaran dan transaksi lainnya yang dimiliki oleh nasabah ritel. *Bussiness Banking* Segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga merupakan fokus bisnis Bank dalam rangka menunjang program unggulan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Hal tersebut sejalan dengan

potensi pasar, dimana pelaku bisnis di Indonesia adalah mayoritas UKM. Layanan Bank pada segmentasi *business banking* meliputi pembiayaan dan dana *retail*. Jumlah pembiayaan untuk segmen *business banking* diatas Rp200 juta sampai dengan Rp5 miliar.

Tabel 2
NPF Bank Syariah Mandiri 2015-2020
(Dalam Persen)

Tahun	NPF (%)
2015	4,05%
2016	3,13%
2017	2,71%
2018	0,72%
2019	1,00%
2020	1,56%

Sumber : *Annual Report Bank Mandiri Syariah*

Mengenai NPF pada tahun 2015, Bank Syariah Mandiri mengalami NPF tinggi yaitu mencapai 4,05%, namun pada tahun 2016-2018 NPF mengalami penurunan yang positif hingga 0,72% pada tahun 2018, namun pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan secara terus menerus namun masih dalam angka yang wajar yaitu 1,56%.

Dari berbagai kategori pembiayaan segmen *business banking* yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya ialah *asset protection lending* (APL) yaitu pembiayaan dengan skala besar yang permanen namun menggunakan fasilitas jangka pendek. Kebutuhan permanen ini umumnya berhubungan dengan suatu tingkat kebutuhan modal kerja. Jadi *asset protection lending* memadukan karakteristik *asset conversion lending* (fasilitas jangka pendek) dengan *cash flow lending* (kebutuhan permanen) menjadi suatu bentuk pinjaman yang berbeda dengan *asset conversion lending* (ACL) dimana kebutuhan pinjaman bersifat sementara dan pelunasan berasal dari selesainya *AC cycle*, APL merupakan pendanaan dari *AC cycle* yang berulang-

ulang secara permanen terus-menerus.⁸ Pemberian pembiayaan berdasarkan pemikiran ini adalah bank tidak mengharapkan pokok pinjaman akan lunas di akhir periode. Karena, yang dibiayai adalah *permanent current asset*. Pinjaman ini bersifat *revolving* yang mungkin dapat menjadi *evergreen loan* (pinjaman yang terus-menerus). Pemikiran ini mengikuti prinsip akuntansi *going concern*, yakni suatu bisnis akan terus berlangsung. Sumber pengembalian pinjaman berasal dari penurunan tingkat *permanent current asset*. Hal tersebut umumnya berarti penurunan tingkat penjualan. Atau, perusahaan tidak tumbuh agresif. Kedua hal tersebut akan membuat *internal cash flow* berlebih dan dapat melunasi pinjamannya. Mengikuti prinsip pemberian pembiayaan ini, sejauh debitor dapat memenuhi kewajibannya bagi hasil dan biaya-biaya pembiayaan secara teratur, itu sudah dianggap cukup dan tidak dipusingkan dengan pengembalian pokok.⁹

Asset protection lending rationale merupakan pemikiran bank untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya. Pada dasarnya setiap pembiayaan tidak jauh dari risiko, karena semakin tinggi dana yang disalurkan, maka semakin tinggi risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, bank tersebut harus selektif dalam memberikan pembiayaan agar terhindar dari risiko yang akan terjadi. Bank harus lebih jeli dalam mengumpulkan berkas-berkas penting untuk dijadikan bukti apabila terjadi kesalahan pada saat memberikan pembiayaan dan diharapkan mampu mengendalikan serta meminimalisirkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Pembiayaan pada kategori *asset protection lending*, berfokus membiayai modal kerja seperti, barang komoditas. Pada dasarnya bank akan memberikan pembiayaan untuk stok barang, artinya keuntungan yang diambil dari pembiayaan ini adalah bagi hasil dari penjualan nasabah. Jika stok barang yang dibiayai oleh bank berjalan lancar maka keuntungan yang didapat bank pun

⁸ Alfianila, Rully, T., Rifqy, T., "Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* Pada Pembiayaan Korporasi Di Bank Syariah", Vol.4 No 1, 2018, h. 8.

⁹ Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Credit (Account) Officer*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.184.

akan baik, begitu sebaliknya jika keadaan usaha nasabah sedang menurun maka keuntungan yang didapat akan menurun, bahkan bisa jadi nasabah tidak dapat membayarkan bagi hasil kepada bank, pembiayaan ini sangatlah bergantung dari kemandirian bisnis nasabah dan yang bisa saja bank akan terus memberikan pembiayaan selama bisnis itu terus berjalan dan akan baru berhenti jika bisnis itu berakhir, ini berarti bank akan terus memberikan modal selama waktu yang tidak bisa ditentukan, analisa yang dilakukan oleh bank pun harus selektif, karena jika pihak bank tidak berhati-hati dalam memberikan pembiayaan akan terjadi risiko yang dapat merugikan bank, karena bisa saja usaha yang dijalani nasabah mengalami kerugian. Terlebih *Asset protection lending*, berfokus membiayai modal kerja berskala besar (satuan miliar).

Pandemi *corona* memberi pukulan bagi industri *retail*. Hal ini menyebabkan laba bersih sejumlah emiten anjlok tajam hingga merugi ratusan miliar di semester 1 2020 lantaran banyak gerai yang tutup sementara seiring pembatasan sosial bersekala besar.¹⁰ Tentunya ini sangat mempengaruhi pembayaran pinjaman serta bagi hasil yang dilakukan debitur kepada bank. Kasus fenomenal ialah jatuhnya *Barings Bank* yang telah berusia 233 tahun karena kelalaiannya dalam mengelola risiko operasional. Kejatuhan *Barings Bank* tersebut terjadi karena *fraud* yang dilakukan oleh seorang karyawan yang dianggap memiliki kecerdasan dalam mengelola dana nasabah sehingga pihak bank memberikan wewenang terlampaui besar kepada karyawan yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai manipulasi transaksi. Akibatnya, *Barings Bank* harus dijual hanya dalam kurun waktu 3 tahun kepada Bank ING (Belanda) hanya seharga satu *poundsterling* per lembar saham. Dari permasalahan diatas dapat kita lihat bahwa risiko yang terjadi pada pemberin pembiayaan sangat beragam bisa saja dari

¹⁰Kata data, “Imbas Corona, Tiga Perusahaan Retail Besar Merugi Ratusan Miliar”, <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/imbasp-corona-tiga-perusahaan-retail-besar-merugi-ratusan-miliar>”, (Diakses pada 10 April 2021)

faktor keadaan ekonomi bahkan dari kemudahan bank dalam memberikan pembiayaan.¹¹

Permasalahan yang sering terjadi dalam melakukan pembiayaan adanya risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaan yang sudah diambil dalam masa pemberian pembiayaan. Selain itu jika pembiayaan debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, seperti pelanggaran ketentuan yang telah disepakati, sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal, serta dalam pengembalian pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (*debitur* dan *kreditur*). Adapun titik fokus penelitian ini dalam mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan, terutama pada pembiayaan *asset protection lending*. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh bank adalah dengan cara menerapkan prinsip *asset protection lending rationale* yang sudah berstandar syariah pada setiap pemberian pembiayaan. Penerapan *Asset Protection Lending Rationale* (APLR) pada segmen *business banking* terlebih pada pembiayaan modal kerja permanen diharapkan agar bank syariah dapat memastikan proses dan jalannya pembiayaan berjalan dengan baik tanpa ada masalah terkhusus terjadinya pembiayaan macet, peran manajemen risiko dalam pembiayaanpun sangat penting mengingat ancaman risiko yang tinggi yang dapat mengganggu stabilitas keuangan bank.

Setiap struktur analisa pembiayaan di perbankan syariah memiliki peraturan yang berstandar syariah yang telah diatur Oleh DSN yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist guna memastikan bahwa bank syariah menjalankan bisnis yang terhindar dari hal yang dilarang seperti riba, gharar, maisir, dan barang-barang non halal. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan

¹¹ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hal. 6.

dengan sang pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia. namun dalam implementasinya apakah *asset protection lending rationale* (APLR) telah sesuai dengan standar usaha Bank Syariah yang mengacu pada peraturan BI atau OJK dan DSN yang berstandar syariah tidak melanggar aturan yang berlaku.

Maka dari pemaparan inilah penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi *Asset Protection Lending Rationale* (APLR) dalam meminimalisir risiko pembiayaan dengan standar pelaksanaannya pada Bank Syariah. Penilaian terhadap calon debitur pada dasarnya dilakukan tidak hanya terhadap calon debitur *Asset Protection Lending Rationale* (APLR) merupakan penilaian bank syariah terhadap kapasitas calon debitur terhadap pembiayaan di segmen *business banking* yang, kemudian sesuai penjelasan diatas bahwa setiap bank menerapkan *Asset Protection Lending Rationale* (APLR) berbeda-beda yang membuat peneliti tertarik bagaimana implementasi *Asset Protection Lending Rationale* (APLR) menempatkan pada Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung.

D. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. *Non performing financing* pada Bank mengalami naik turun setiap tahunnya.
2. Adanya risiko pembiayaan macet yang cukup besar pada segmen pembiayaan *business banking* dapat mempengaruhi *non performing financing* pada Bank.
3. Pembiayaan pada segmen *business banking* yang dilakukan oleh bank syariah *asset protection lending* yaitu pembiayaan yang memiliki keuntungan yang besar bagi bank karena bersifat *revolving* atau *evergreen* namun memiliki risiko yang lebih besar dibanding pembiayaan lainnya.
4. Adanya kemungkinan implementasi *asset protection lending rationale* tidak sesuai standar syariah.

E. Fokus Penelitian

Penelitian ini memerlukan fokus yang terarah dan mengenai sasaran agar permasalahan yang diangkat tidak meluas. Fokus masalah tersebut adalah:

1. Variabel *asset protection lending rationale* yang akan diteliti pada skripsi ini adalah Pembiayaan pada segmen *business banking* di PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung.
2. Variabel risiko pembiayaan yang akan diteliti merupakan implementasi *asset protection lending rationale* dalam meminimalisir risiko pembiayaan di segmen *business banking* di PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi *asset protection lending rationale* dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung?
2. Bagaimana penerapan *asset protection lending rationale* pada perbankan syariah dalam perspektif Islam?

G. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi *asset protection lending rationale* dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *asset protection lending rationale* pada perbankan syariah dalam perspektif Islam.

H. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dapat menambah pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca. Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam tentang *asset protection lending rationale* pada pembiayaan segmen *business banking* di bank syariah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Bank Syariah

Bagi bank diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk mengelola dan menerapkan manajemen risiko pembiayaan lebih baik lagi.

b. Bagi penulis

Secara praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan *asset protection lending rationale* pada pembiayaan segmen *business banking* di bank syariah.

I. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu untuk membedakan dengan penelitian yang saya buat:

1. Rani Alfiani, Rully Trihantana, T. Rifqy Thantawi, Jurnal Nisbah Vol. 4 No.1 Tahun 2018, yang berjudul “Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* Pada Pembiayaan Korporasi di Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri)”.

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan metode yuridis empiris. Sumber data digunakan berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa pemaparan standar

dan implementasi yang dilakukan oleh BSM bahwa bank syariah mandiri telah melakukan *Asset Protection Lending Rationale* pada Pembiayaan Korporasi dengan sesuai kepada PBI No. 13/23/PBI/2011, *booklate* OJK tahun 2014 edisi 1 mengenai manajemen risiko pada BUS, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah oleh karenanya Bank Syariah Mandiri telah melakukan implementasi *Asset Protection Lending Rationale* pada Pembiayaan Korporasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.¹²

2. Amalia Eka Purnamasari, Musdholifah, Volume 9 No. 1 Oktober 2016, yang berjudul “Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015”.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dan jenis data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni laporan keuangan seluruh Bank Umum Syariah yang diperoleh dari website resmi masing-masing bank serta data faktor eksternal bank dari situs BI dan BPS. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda yang. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh variabel pertumbuhan PDB, inflasi, nilai tukar, CAR, ROA, BOPO dan ukuran bank terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2015, maka dapat ditarik kesimpulan : *Pertama*, Pertumbuhan PDB, inflasi, nilai tukar, CAR, ROA, BOPO dan ukuran bank secara simultan berpengaruh terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada Bank Umum Syariah selama periode 2012-2015. *Kedua*, Pertumbuhan PDB, nilai tukar dan CAR tidak berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada Bank Umum Syariah selama periode 2012-2015. *Ketiga*, Inflasi dan BOPO tidak berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada Bank Umum Syariah selama

¹²Alfianila, Rully, T., Rifqy, T., “Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* Pada Pembiayaan Korporasi Di Bank Syariah”, Vol.4 No. 1, 2018, h. 19.

periode 2012-2015. *Keempat*, ROA berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada Bank Umum Syariah selama periode 2012-2015. *Kelima*, Ukuran bank berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada Bank Umum Syariah selama periode 2012-2015.¹³

3. Fatimah, Volume 1, No. 1 (2018) yang berjudul “Pengaruh Analisis Kredit dan Pengawasan Kredit Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Dana Nagoya Di Kota Batam”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif (hubungan). Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengetahui hubungan antara analisis kredit terhadap persetujuan pembiayaan. Instrumen penelitian pada studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang bersifat tertutup. Hasil penelitian menerangkan bahwa: Besarnya tanggapan responden terhadap variabel analisis kredit menunjukkan angka sebesar 4,01% yang berarti analisis kredit pada PT. BPRS Artha Madani sudah berjalan baik, besarnya tanggapan responden terhadap variabel persetujuan pembiayaan menunjukkan angka penafsiran sebesar 4,01% yang berarti secara keseluruhan variabel terikat dikategorikan baik, koefisien r yang didapat adalah 0,728% dan nilai ini menunjukkan hubungan variabel x (analisis kredit) dengan variabel y (persetujuan pembiayaan) adalah kuat.¹⁴

4. Tavitri Rangkuti, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, pp. 68-84 “Pengaruh Analisis Kredit Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani Cikarang, Jawa Barat”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif (hubungan). Dengan penelitian ini maka

¹³Amalia Eka Purnamasari, Musdholifah, “Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015”, Vol. 9 No. 1, 2016, h. 23.

¹⁴Fatimah, “Pengaruh Analisis Kredit dan Pengawasan Kredit Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Dana Nagoya Di Kota Batam”. Vol. 1, No. 1, 2018, h. 84.

akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengetahui hubungan antara analisis kredit terhadap persetujuan pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Besarnya tanggapan responden terhadap variabel analisis kredit menunjukkan angka sebesar 4,01% yang berarti analisis kredit pada PT BPRS Artha Madani sudah berjalan baik, besarnya tanggapan responden terhadap variabel persetujuan pembiayaan menunjukkan angka penafsiran sebesar 4,01% yang berarti secara keseluruhan variabel terikat dikategorikan baik, koefisien r yang didapat adalah 0,728% dan nilai ini menunjukkan hubungan variabel x (analisis kredit) dengan variabel y (persetujuan pembiayaan) adalah kuat.¹⁵

5. Ayu Triesnaning Rahmawati, Muhammad Saifi, Raden Rustam Hidayat, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 35 No. 1 Juni 2016 “Analisis Keputusan Pemberian Kredit Dalam Langkah Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi kasus pada Kredit Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk unit Slawi 1, Kab Tegal Jawa tengah)”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, disimpulkan dari study kasus yang dijadikan sampel memperlihatkan bahwa mantri pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Slawi 1, Kab. Tegal kurang memperhatikan *condition of economy*, sehingga masih terjadi tunggakan yang membuat target yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi. Selain itu hasil analisa seorang mantri akan berpengaruh terhadap pemberian kredit yang diberikan, apakah akan mempersulit dirinya atau mempermudah. Hal ini dikarenakan seorang mantri diberi pertanggungjawaban

¹⁵Tavitri Rangkuti, “Pengaruh Analisis Kredit Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani Cikarang, Jawa Barat”. Vol. 1, No. 1, Juni 2018, h. 68-84.

untuk menganalisa, memberi rekomendasi dan menagihnya apabila debitor gagal membayar.¹⁶

6. Sabina Brkic, MBA, prof. Migdat Hodzic, PhD, assoc. prof. Enis Dzanic, PhD. 2017 *"Fuzzy Logic Model Of Soft Data Analysis For Corporate Client Credit Risk Assessment In Commercial Banking"*.

Penelitian ini membahas penggunaan logika fuzzy sebagai alat pendukung untuk evaluasi risiko kredit klien korporasi di lingkungan perbankan komersial. Ini mendefinisikan kemungkinan distribusi soft data yang digunakan untuk klien korporasi. Penilaian risiko kredit dengan menerapkan pemodelan logika fuzzy, dengan tujuan utama untuk mengembangkan ahli pengambilan keputusan baru model fuzzy untuk mengevaluasi risiko kredit klien korporasi di bank. Saat ini, memprediksi risiko kredit perusahaan tidak akurat dan ambigu, serta dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal itu tidak dapat didefinisikan secara tepat. Tidak seperti metode tradisional untuk penilaian risiko kredit, logika fuzzy dapat dengan mudah dilakukan menggabungkan istilah linguistik dan pendapat ahli yang membuatnya lebih disesuaikan dengan kasus-kasus dengan tidak cukup dan data keras yang tidak tepat, serta untuk pemodelan risiko yang tidak sepenuhnya dipahami.

Model fuzzy dari soft data, disajikan dalam penelitian ini, dibuat berdasarkan pengalaman ahli pinjaman perusahaan dari bank komersial di Bosnia dan Herzegovina. Pasar ini sangat kecil dan berperilaku tidak rasional dan seringkali tidak menentu dan oleh karena itu membuat penilaian risiko dan proses pengambilan keputusan manajemen sangat kompleks dan tidak pasti yang membutuhkan metode baru untuk pemodelan risiko yang akan dievaluasi. Para ahli diwawancarai tentang jenis

¹⁶Ayu Triesnaning Rahmawati, dkk, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| "Analisis Keputusan Pemberian Kredit Dalam Langkah Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi kasus pada Kredit Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk unit Slawi 1, Kab Tegal Jawa tengah)", Vol. 35 No. 1, Juni 2016, h. 68

variabel lunak yang digunakan untuk penilaian risiko kredit klien korporasi, serta untuk memberikan masukan bagi menghasilkan fungsi keanggotaan variabel lunak ini. Semua variabel lunak yang diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi segmen berikut: stabilitas, kapabilitas dan kesiapan / kesediaan nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Hasil dari pekerjaan ini merupakan pendekatan baru untuk penggunaan / penilaian data lunak dengan tujuan dimasukkan ke dalam *a model fusi soft-hard* data baru dan superior untuk penilaian risiko kredit klien.¹⁷

Berdasarkan pelacakan bahan-bahan pustaka yang terdapat pada karya ilmiah berupa jurnal yang telah dilakukan oleh peneliti yang dapat dijadikan sebagai data-data pendukung dalam penulisan skripsi ini dan peneliti belum menemukan skripsi tentang *Asset Protection Lending Rationale* yang berkaitan langsung dengan Risiko Pembiayaan dijadikan sebagai penelitian perbankan syariah yang berjudul “Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* dalam Meminimalisir Risiko (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung)”. Dengan demikian, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya (berbeda) dan juga layak untuk diteliti.

J. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸

1. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.¹⁹ Lokasi penelitian yang dipilih penulis ialah di PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung.

¹⁷Sabina Brkic, dkk, “Fuzzy Logic Model Of Soft Data Analysis For Corporate Client Credit Risk Assessment In Commercial Banking”, 2017, h. 30.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2.

¹⁹Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, hlm. 52.

Dengan adanya pemilihan tempat penelitian bukanlah tidak dengan alasan, peneliti memilih bank tersebut dikarenakan Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang telah melaksanakan pembiayaan *asset protection lending rationale* yang membiayai *permanet current asset*.

2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna-*meanings* (hakikat dan esensi). Peneliti berusaha melakukan pendekatan dengan partisipan dalam pengumpulan data (*asumsi epistemologis*), menggunakan gaya penulisan naratif, penggunaan istilah/terminologi kualitatif, dan batasan definisi-definisi yang digunakan (*asumsi retorika*), menggunakan logika induktif, bekerja secara rinci, deskripsi rinci tentang konteks studi yang diteliti, dan desain penelitian fleksibel/dapat berubah (*asumsi metodologi*). Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, dokumen, website dan referensi lainya yang berkaitan dengan *Asset Protection Lending Rationale* (APLR).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Menurut M. Nazir metode dektiptif itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Bentuk penyelidikan deskriptif ini adalah menuturkan

dan menafsirkan data yang ada.²⁰ Maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.²¹ Sumber data primer ini adalah buku-buku, artikel, dan hasil wawancara dengan manajer *business banking* PT. Bank Mandiri Syariah KC Diponegoro Bandar Lampung untuk mendapatkan informasi terkait *Asset Protection Lending Rationale*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan *Asset Protection Lending Rationale* seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang,

²⁰Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakata: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 186.

²¹Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 91.

tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau objek itu.²² Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga besar PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Dalam penentuan menggunakan *purposive sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan yaitu karyawan di bidang *business banking* di Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung.

4. Teknik Pengambilan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling menukarkan ide dan informasi melalui tanya jawab, sehingga akan menghasilkan makna yang terperinci dalam topik tertentu.²³ Wawancara yang dilaksanakan peneliti adalah *interview* semi terstruktur, dimana peneliti berusaha menggali informasi yang lebih mendalam tentang objek yang diteliti, sehingga peneliti memperoleh deskripsi permasalahan lebih lengkap dan akurat. Adapun obyek yang akan diwawancarai adalah praktisi-praktisi di bagian segmen *business banking*.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 115.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 410-411.

b. Observasi

Metode observasi adalah pencatatan dan pengamatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Selain itu juga dilakukan pengamatan langsung tentang pelaksanaan penerapan kegiatan segmen *business banking* yaitu pembiayaan komersial yang dilakukan dan secara langsung melihat cara melayani calon nasabah sampai pembiayaan disalurkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan bahan atau data yang dilakukan dengan metode mengambil/mengumpulkan gambar, tulisan, atau dalam bentuk lainnya yang merupakan peristiwa yang sudah berlalu, baik secara khusus maupun secara umum yang berkaitan dengan penerapan *Asset Protection Lending Rationale*. Dokumentasi dalam hal ini dilakukan oleh peneliti guna untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian, adapun dokumentasi berupa foto-foto dan rekaman wawancara.

5. Validitas Data

Menurut Sutopo validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian.²⁴ Terdapat beberapa cara yang biasanya dipilih untuk mengembangkan validitas (kesahihan) data penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut.²⁵ Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Artinya, guna menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda.

²⁴Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm. 92.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 330.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar didalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam data yang ada. Triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa diuji bila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁷ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.334

²⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

b. Penyajian Data

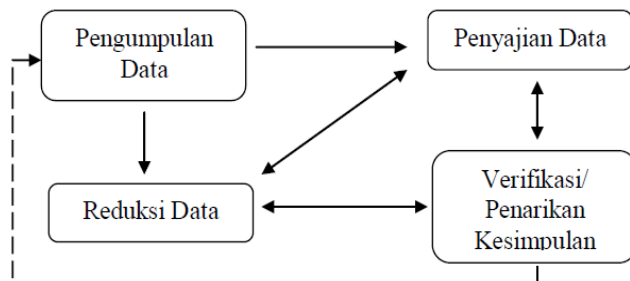
Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang

menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1
Alur Analisis Data



Sumber: Miles&Hubermen

7. Pengolahan Data

- a. Teknik mengumpulkan data dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sekunder tentang implementasi *asset protection lending rationale* pada segmen *business banking*.
- b. Tahap memilih data yang terkumpul dari beberapa sumber.
- c. Memilah-milah dan menelaah data yang terkumpul dari beberapa sumber mengenai implementasi *asset protection lending rationale* pada segmen *business banking*.
- d. Tahap mengklasifikasikan sebuah data yang didapatkan dari lokasi penelitian.

8. Tahapan Penelitian

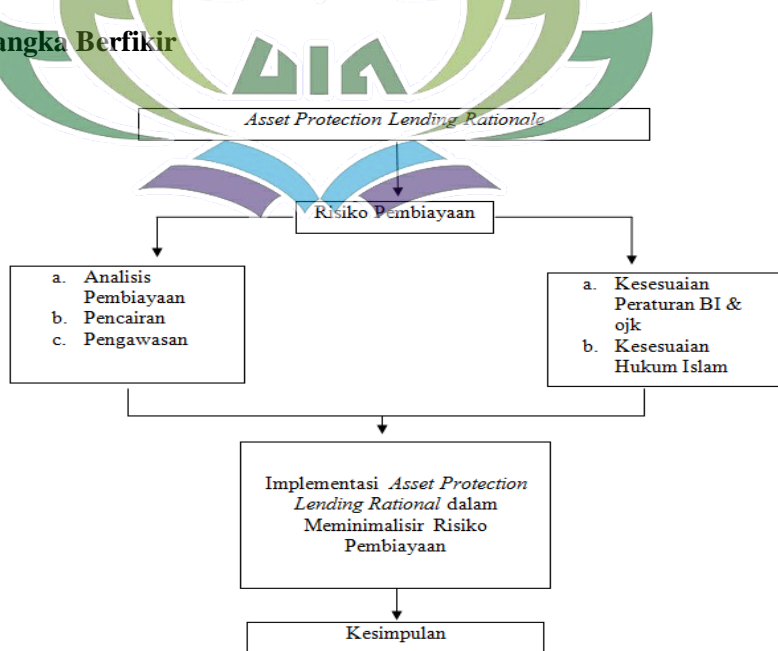
Menurut Moleong ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif antara lain :²⁸

- a. Tahap pra lapangan, yaitu tahap yang orientasinya sebelum turun ke lapangan dengan menentukan fokus penelitian. Dalam tahap ini peneliti melakukan pengamatan pada implementasi *asset protection lending rationale* pada pembiayaan *business banking* di bank syariah beberapa sumber (modul, jurnal penelitian *website* dan observasi awal ke PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung).
- b. Tahapan kegiatan lapangan, yaitu tahap yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Pada tahap ini peneliti fokus pada segmen *business banking* dengan *asset protection lending rationale* dengan merujuk pada standar baku berdasarkan lembaga regulator.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 85-103.

- c. Tahap analisis data, meliputi kegiatan penelitian dalam mengelolah dan mengorganisir data yang diperolehnya melalui tahap lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi) kemudian melakukan penafsiran data terkait masalah yang diteliti. Selanjutnya penelitian melakukan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dengan uji validitas, reliabilitas, dan objektivitas, sebagai dasar bagi peneliti untuk mendapatkan data yang benar dan akurat.
- d. Tahap penulisan laporan, tahap ini dilakukan untuk menyusun hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti selama rangkaian penelitiannya. Kemudian peneliti melakukan konsultasi dan bimbingan dengan dosen pembimbing untuk perbaikan dan masukan untuk hasil penelitian yang lebih baik.

J. Kerangka Berfikir



Gambar 2
Kerangka berfikir

Penghasilan bank terbesar didapat dari bagi hasil atau margin yang diperoleh dari pembiayaan bank. Pembiayaan merupakan pengadaan uang atau tagihan yang sejenis dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan di antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan individu tersebut yang diberikan dana untuk membayar kembali tagihan tersebut sampai jangka waktu yang sudah ditentukan dengan bagi hasil sebagai *feedback*.²⁹ Pembiayaan merupakan penghasil aktiva produktif terbesar bagi sebuah bank. Namun pembiayaan juga mempunyai risiko yang tinggi yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Salah satu permasalahan yang muncul adalah pembiayaan macet dimana dana yang disalurkan kepada nasabah tidak dapat ditagih kembali sehingga mengancam likuidasi bank.

Manajemen Risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Bank harus menetapkan suatu sistem penilaian (*internal credit reviews*) yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko kredit. Dalam hal manajemen risiko suatu bank berpengaruh positif terhadap *non performing financing*, dikarenakan ketika bank melaksanakan manajemen risiko dengan baik maka tingkat *non performing financing* akan kecil.

Lending rationale merupakan pemikiran bank syariah secara rasional dalam menilai debitur mengenai kemampuan mengembalikan jumlah pinjamannya kepada bank syariah atau yang biasa dikenal dengan analisis calon debitur. *Lending rationale* dilakukan berdasarkan proses dalam penerapan manajemen risiko atau salah satu prinsip kehati-hatian bank dalam menilai nasabah untuk diberikan pembiayaan oleh perbankan syariah. *Lending rationale* dilakukan untuk mengurangi terjadinya risiko pembiayaan yang dikarenakan terlalu mudahnya bank syariah dalam memberikan pinjaman atau investasi, hal ini dapat didasari karena bank syariah diminta

²⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, edisi revisi* (Jakarta: PT .Raja grafindo persada, 2008), h. 56.

untuk memanfaatkan DPK yang diterima dengan maksimal, sehingga penilaian debitur harus dilaksanakan dengan baik.

Salah satu katagori pembiayaan segmen *business banking* yang dilakukan bank syariah yaitu *asset protection lending* yang merupakan Pembiayaan modal kerja dengan skala besar yang permanen namun menggunakan fasilitas jangka pendek. Kebutuhan permanen ini umumnya berhubungan dengan suatu tingkat kebutuhan modal kerja. Pembiayaan skala besar yang berarti risiko yang mengikutipun besar maka dari itu *asset protection lending rationale* diciptakan untuk menilai, menganalisis kelayakan debitur dalam memberikan suatu pembiayaan. Yang mempunyai hubungan yang positif dalam meminimalisir risiko yang nantinya akan terjadi. Bagaimana Implementasi yang dijalankan PT. Bank Mandiri Syariah KC Diponegoro Bandar Lampung apakah standar *asset protection lending rationale* sesuai dengan peraturan BI, OJK dan Ketentuan Islam dalam meminimalisir pembiayaan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

Bank pada fungsi adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

1. Definisi Bank Syariah

Seiring perkembangan zaman bank syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan umat muslim, dalam melakukan kegiatan perbankan, menabung, pembiayaan, investasi, dan lain-lain. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga Bank adalah yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha Bank selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: memindahkan uang, menerima dan membayar kembali uang nasabah, membeli dan menjual surat-surat berharga, dan memberi jaminan Bank.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³¹ Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta

³⁰Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 2.

³¹Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 5.

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank syariah bukan hanya bebas bunga, melainkan juga memiliki orientasi pencapaian sejahtera. Secara fundamental karakteristik bank syariah, yaitu:³²

- a. Penghapusan riba. Bank syariah ingin menghilangkan sistem riba yang ada di bank konvensional (bunga), dalam hal ini digantikan dengan bagi hasil/margin.
- b. Pelayanan pada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- c. Bersifat universal, yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d. Adanya evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan, yang berorientasi pada penyertaan modal karena bank komersial syariah menerapkan *profit-loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara Bank syariah dan pengusaha.
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi likuiditas dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen Bank sentral berbasis bank syariah.

2. Sejarah Bank Syariah

Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan akan keuangan syariah yang terus berkembang, mendorong bank ikut terbawa kemajuan konsep syariah sehingga bedirinya dua jenis Bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan Bank berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan utama dari kedua jenis Bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam Bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga, sedangkan dalam Bank Syariah

³²Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 2.

didasarkan pada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, bagi untung maupun rugi.³³

Sejarah awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar 1940-an. Kemudian di Mesir pada 1963 berdiri *Islamic Rura Bank* dan masih berskala kecil. Kemudian tahun 1975 di Uni Emirat Arab, ditandai dengan berdirinya *Dubai Islamic Bank*. Pada 1977 di Kuwait berdiri *Kuwait Finance House* yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali ke Mesir pada 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama *Faisak Islamic Bank*. Langkah ini kemudian diikuti oleh *Islamic International Bank for Invesment and Development Bank*. Pada 1983 di Siprus berdiri pula *Faisa Islamic Bank of Kibris*. Kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir pada 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir pada 1984 yaitu dengan hadirnya *Daar al-Maal al-Islami Faisal Finance Institution* dan mulai beroperasi pada 1985.

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan. Di Indonesia kehadiran bank yang berdasarkan syariah relatif baru, yaitu pada awal 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank

³³Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), h. 213-215.

Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980.

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani pada 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini Bank Muamalat Indonesia sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti, Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya dari kehadiran Bank Syariah di Indonesia sangat mengembirakan. Di samping BMI saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari Bank konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar. Bank-Bank Syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga, Bank Bukopin, BCA, dan Permata.

3. Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dari unsur riba, caranya:

- a. Menjauhkan Mengindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha.
- b. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

- c. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.
 - d. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nissa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksuibarang/jasa, mendorong kelancaran arus barang. Jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan insflansi.
4. Sistem Operasioanal Bank Syariah
- Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan, dan universal tanpa menggunakan riba dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya tidak hanya berlaku untuk orang islam saja tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan bisnisnya ada 4 sistem operasional bank syariah yaitu :
- a. Pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), Bank Syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan *mudharib*. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, Bank Syariah berperan sebagai penerima titipan.³⁴

³⁴Rizal Yaya dan Aji Erlangga Martwawijera, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat), h.51.

- b. Kedua, dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.
- c. Ketiga, dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
- d. Keempat, selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, Bank Syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter off credit*, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh pihak bank syariah tanpa harus dibagi.

B. Pembiayaan Bank Syariah

Salah satu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat ialah pembiayaan, pembiayaan saat ini dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif mulai dari membeli kendaraan hingga mesin/peralatan untuk kebutuhan bisnis. Dengan pembiayaan, masyarakat diberikan kemudahan dan kenyamanan dalam transaksi pembelian. Pembiayaan bank syariah yang berbasis bagi hasil/margin, hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, dalam setiap transaksi keuangan bisa saja menjadi khawatir terhadap operasional pembiayaan konvensional. Maka, pembiayaan syariah memfasilitasi transaksi yang aman sesuai dengan prinsip syariah.

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan daya guna modal, barang, peredaran barang, menimbulkan gairah usaha masyarakat dan alat stabilitas ekonomi.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.³⁵ Pembiayaan dalam Bank Syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.³⁶

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998³⁷ yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008,³⁸ pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

³⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001). h, 160

³⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h, 302

³⁷Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

³⁸Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008 Pasal 25

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam dua hal berikut.³⁹

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Kegiatan produktif pada pembiayaan dapat meningkatkan suatu penghasilan ataupun perekonomian, karena modal yang diberikan akan berputar dan debitur mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang mereka. Dalam menjalankan kegiatan produktif, menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.⁴⁰

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, . . . h, 160

⁴⁰*Ibid.* h, 161

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkata produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.⁴¹ Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yaitu:⁴²

1) Modal kerja (*working capital asset*)

Modal kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi secara lancar dan normal.

2) Modal kerja bruto (*gross working capital*)

Modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current asset*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

3) Modal kerja netto (*net working capital*)

Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain.

- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁴³ Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh

⁴¹*Ibid.* h. 161

⁴²Adiwarman A. Karim, h. 231-232

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, . . . h. 161

imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:⁴⁴

- 1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*).
- 2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan Badan-badan Pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- 3) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapat terbesar yang dimiliki bank, maka setiap pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat tentu memiliki tujuan dan fungsi masing-masing, diantaranya:

a. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi Bank Syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:⁴⁵

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

⁴⁴Adiwarman A. Karim, . . . h, 236-237

⁴⁵Muhammad, . . . h, 303

3) Masyarakat

- a) Pemilik dana, mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
- b) Debitur yang bersangkutan, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (sektor konsumtif).
- c) Masyarakat umumnya-konsumen, dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

b. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:⁴⁶

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam bentuk presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Dana yang mengendap di bank tidaknya *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

⁴⁶*Ibid.* h, 304-308

- 2) Meningkatkan daya guna barang
 - a) Produsen dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat
 - b) Produsen dapat mendistribusi barangnya.
- 3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan usaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.
- 5) Stabilitas ekonomi

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

4. Falsafah Pembiayaan di Bank Syariah

Ada perbedaan konsep kredit dan konsep pembiayaan. Kredit lebih menekankan pada konsep hutang. Sedangkan pembiayaan adalah kemitraan antara para pihak yang terkait dalam aktivitas bisnis. Dalam melaksanakan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi:⁴⁷

a. Aspek syariah

Pada dasarnya pembiayaan syariah muncul atas semangat terhadap nilai keIslaman untuk menjaga (membudayakan) prinsip-prinsip syariah, dimana untuk menghindari praktik yang menyimpang, yaitu unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*.

b. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi dalam menganalisis dampaknya yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap

⁴⁷ *Ibid.* h. 314

perekonomian masyarakat dan sosial secara umum, seperti: pengangguran, meningkatkan pendapatan, membuka ekonomi daerah tertentu, dan lain-lain.

Maksudnya dalam realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam (antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* serta bidang usahanya halal), disamping tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bank syariah maupun nasabah itu sendiri.

C. *Business Banking*

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat meningkatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang. Dari berbagai sektor pembiayaan perbankan syariah yang berfokus pada pembiayaan sektor riil ialah *business banking* dimana fokus bisnis menunjang program pemerintah.

1. *Definisi Business Banking*

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati

oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Business banking adalah sebuah layanan yang dapat memenuhi kebutuhan perbankan pada setiap tahap siklus bisnis. Sejalan dengan PBI tersebut di atas Segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga merupakan fokus bisnis Bank dalam rangka menunjang program unggulan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Hal tersebut sejalan dengan potensi pasar, dimana pelaku bisnis di Indonesia adalah mayoritas UKM. Layanan Bank pada segmentasi *bussiness Banking* meliputi pembiayaan dan dana retail. Jumlah pembiayaan untuk segmen *bussiness Banking* diatas Rp200 juta sampai dengan Rp5 miliar.⁴⁸

2. Jenis Pembiayaan *Business Banking*

Facilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah individu maupun perusahaan yang membutuhkan pinjaman baik untuk perputaran usaha maupun untuk investasi dengan jaminan. Salah satu jenis pembiayaan yang ada di segmen *business banking* ialah:⁴⁹

Tabel 3

Jenis Pembiayaan Business Banking

Business Banking	a. Pembiayaan kepada perorangan atau badan usaha swasta untuk tujuan produktif	s.d Rp25 miliar	Rp200 juta	Unit Pengelola Segmen Mikro,
	b. Pembiayaan kepada perorangan atau badan usaha swasta untuk tujuan produktif (bukan anggota kelompok peminjam pembiayaan dan tidak termasuk kriteria khusus nasabah di segmen komersial)	> Rp25 miliar	s.d Rp5 miliar	Cabang
	1) Pembiayaan Koperasi (termasuk untuk anggotanya dengan tujuan produktif & konsumtif) 2) Pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Linkage) 3) BPRS 4) Pembiayaan program (non mikro)	Tanpa memerhatikan GAS dan limit nasabah		
	c. Pembiayaan produktif kepada travel haji & umrah beserta supply chainnya			

Sumber: AR BSM

Dalam hal ini segmen *business banking* yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung

⁴⁸ PT. Bank Syariah Mandiri, *Annual Report*, (2019), hlm 36

⁴⁹ *Ibid.*

memberikan pembiayaan kepada perorangan atau badan usaha untuk tujuan produktif modal kerja permanen (*asset protection lending*) yaitu membiayai stok perdagangan berskala besar diatas 1 miliar rupiah, yang bersifat *revolving* dan *evergreen*.

D. Menyusun Fasilitas Kredit

Proses analisis kredit yang dilakukan bank kepada nasabah, sebelum mencairkan pembiayaan salah satunya ialah *facility structure*, yaitu menyusun fasilitas kredit untuk suatu pinjaman. Kita akan masuk kepada konsep-konsep dasar pemberian kredit, yaitu :

1. Tujuan pemberian kredit, sebelum memberikan kredit kepada nasabah kita harus mengetahui tujuan nasabah meminjam, bisa dari untuk dibelikan apa dan berapa jumlahnya.
2. Menentukan struktur fasilitas kredit, setelah mengetahui tujuan pemberian kredit, kita baru bisa menentukan, kredit yang harus diberikan apakah berupa jangka pendek atau jangka panjang, dilunasi langsung atau diangsur.
3. Menentukan risiko utama dari kredit tersebut, dengan kata lain jika memberikan kredit kepada seseorang, kita harus mengetahui risiko utama yang memungkinkan kita tidak dibayar kembali.
4. Mengetahui sumber pembayaran kembali yang artinya ketika kita memberikan kredit kepada seseorang kita harus tau bagaimana mereka akan membayar kembali pinjaman tersebut.

Ke empat dasar ini merupakan dasar penentuan struktur kredit atau yang biasa kita sebut *lending rationale*. Tujuan utama dari struktur kredit adalah pengendalian risiko. Kesalahan dalam pemberian struktur kredit bukan saja meningkatkan risiko bank, namun dapat mengacaukan bisnis debitur. Misalnya, untuk membiayai *permanent current asset*, bank memberikan pinjaman jangka panjang yang harus dikembalikan, dapat dipastikan debitur akan mengalami kesulitan dalam pengembaliannya (kecuali bisnisnya berhenti tumbuh atau tumbuh secara lamban).

Hal itu disebabkan dana pinjaman yang terikat dalam aktiva lancar tidak dimaksudkan untuk dijual cepat. Sebaliknya, bila bank memberikan pinjaman jangka pendek untuk pembelian aktiva tetap, beban jangka pendek perusahaan akan menjadi terlalu berat (likuidasinya menurun). Pada akhirnya, perusahaan tidak dapat membayar pokok pinjaman yang jatuh tempo. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam menyusun struktur kredit yang tepat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. jenis kredit harus sesuai dengan aktiva yang dibiayai. Ikuti prinsip pembiayaan: “kebutuhan jangka panjang harus dibiayai dengan kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan jangka pendek, dibiayai dengan dana jangka pendek”.
2. Sedapat mungkin, atur prasyarat yang harus dipenuhi untuk pencairan kredit. Tujuannya agar bank dapat lebih yakin tujuan pemanfaatan dana.
3. Sedapat mungkin, aturlah aliran dana hasil pencairan kredit. Dengan demikian, bank dapat yakin bahwa dana yang dicairkan benar-benar dimanfaatkan untuk melunasi barang.
4. Aturlah, pembayaran kewajiban. Semakin kuat bank “memegang” sumber pembayaran, semakin kecil risiko. Contoh, pembayaran dari pelanggan langsung ditransfer ke rekening debitor di bank, bekerja sama dengan SDM (Sumber Dana Manusia) perusahaan untuk membayar cicilan KPR dengan cara memotong gaji yang diterima, dan sebagainya.

E. Lending Rationale

Dalam pembiayaan, ada dua dimensi penting yang harus diperhitungkan secara cermat. Pertama adalah jumlah pembiayaan yang dikururkan, dan kedua adalah struktur pembiayaan. Strukturisasi pembiayaan adalah upaya untuk mengatur persyaratan dan jenis kredit sehingga tujuan pembiayaan tercapai dan bank mampu mengendalikan risiko secara lebih baik. Pertimbangan utama dalam penentuan struktur pembiayaan adalah jenis aktiva produktif. Setiap pemberian pembiayaan selalu dikaitkan dengan tujuan penggunaannya.

Tujuan ini selalu dikaitkan dengan jenis aktiva yang dibiayai. Sehubungan dengan hal tersebut ada dasar pemikiran dalam memberikan pinjaman (*lending rationale*).

1. Definisi *Lending Rationale*

Lending rationale merupakan pemikiran bank syariah secara rasional dalam menilai debitur mengenai kemampuan mengembalikan jumlah pinjamannya kepada bank syariah atau yang biasa dikenal dengan analisis calon debitur. *Lending rationale* dilakukan berdasarkan proses dalam penerapan manajemen risiko atau salah satu prinsip kehati-hatian bank dalam menilai nasabah untuk diberikan pembiayaan oleh perbankan syariah. *Lending rationale* dilakukan untuk mengurangi terjadinya risiko pembiayaan yang dikarenakan terlalu mudahnya bank syariah dalam memberikan pinjaman atau investasi, hal ini dapat didasari karena bank syariah diminta untuk memanfaatkan DPK yang diterima dengan maksimal, sehingga penilaian debitur harus dilaksanakan dengan baik.⁵⁰

Analisis kredit merupakan suatu proses berkesinambungan yang menyangkut penelitian secara menyeluruh terhadap faktor internal dan eksternal, secara kualitatif dan kuantitatif, dimasa lampau, kini dan masa akan datang, dalam bisnis debitur atau calon debitur, sebagai data mengambil keputusan secara logis. Banyak kredit analisis hanya memperhatikan masa depan, yang artinya masa lalu perusahaan tidak diperhatikan, hanya digunakan sebagai data-data saja. Padahal bisa jadi suatu perusahaan yang baik dimasa sekarang, dimasalalu pernah mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya, mengulangi terjadinya kembali.

⁵⁰Alfianila, Rully, T., Rifqy, T., "Implementasi Asset Protection Lending Rationale Pada Pembiayaan Korporasi Di Bank Syariah", Vol.4 No. 1, 2018, h. 19.

2. Tujuan *Lending Rationale*

Implementasi dari *lending rationale* tentu memiliki tujuan. Berikut ini yang merupakan tujuan utama dari analisis kredit *lending rationale* adalah untuk:⁵¹

- a. Identifikasi risiko dalam situasi pinjaman.
 - 1) Sumber uang tunai yang digunakan untuk melunasi pinjaman bank. Sumber pembayaran kembali secara spesifik bergantung pada tujuan pinjaman, atau penggunaan dana pinjaman.
 - 2) Kebutuhan pembiayaan khusus memunculkan sifat risiko kepada pemberi pinjaman, yang harus yakin untuk mengevaluasi dengan cermat faktor-faktor yang akan mengurangi risiko tersebut dan melindungi mereka dari kerugian. Sumber pembayaran kembali, tujuan pinjaman, dan risiko menentukan bentuk perlindungan, pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh bank.
- b. Menarik kesimpulan tentang kemungkinan pembayaran kembali.
- c. Membuat rekomendasi tentang jenis dan struktur fasilitas pinjaman yang tepat.

3. Jenis-Jenis *Lending Rationale*

Tujuan utama dalam membedakan ketiga alasan pemberian pinjaman ini adalah untuk memberikan dukungan kepada analis Bank untuk menentukan area atau masalah yang mungkin menjadi perhatian utama ketika mengevaluasi kredit tertentu dan untuk memberikan pendekatan analisis. Penting untuk diketahui bahwa alasan pemberian pinjaman digunakan untuk mengkarakterisasi jenis proposisi pinjaman atau fasilitas kredit dan bukan jenis peminjam. Pemodal selalu dihadapkan pada tiga situasi pinjaman umum atau alasan, berdasarkan:

⁵¹ Ace-grup, “*Bankers Guide to Secure Lending*”, h. 3.

- a. Tujuan pinjaman.
- b. Sumber pembayaran kembali.
- c. Risiko yang melekat dalam situasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga dasar pemikiran dalam memberikan pinjaman (*lending rationales*), yaitu :⁵²

1. *Asset Conversion Lending*

Dasar pemikiran ini dipakai bila bank membiayai kebutuhan jangka pendek yang bersifat sementara. Sesuai namanya, kredit ini dipakai untuk membiayai siklus konversi aset/kas. Jenis aktiva yang dibiayai adalah *fluctuative current asset*. Bila bank memberikan pinjaman dengan pemikiran *asset conversion lending*, bank ingin agar seluruh pokok pinjaman dilunasi pada akhir periode. Sumber pengembalian (*sources of repayment*) pinjaman berasal dari terselesaikannya siklus konversi tersebut.

Dapat disimpulkan *asset conversion lending* merupakan pembiayaan modal kerja untuk satu putaran, satu *project*, pinjaman jangka pendek, membiayai perusahaan karena membutuhkan dana cash untuk usaha yang bersifat musiman/kebutuhan satu saat, terkadang bisa bersifat *revolving*, sumber pembayaran dari keuntungan yang didapat. Menyatakan seluruh bisnis apapun akan dimulai dari *cash* akan berputar dan kembali lagi menjadi *cash*.⁵³

2. *Cash Flow Lending*

Dasar pemikiran ini dipakai bila menyalurkan pinjaman jangka panjang (*long term loan*). Pemanfaatannya adalah untuk membiayai pembelian aktiva tetap (*fixed asset*) atau investasi. Sifat pinjaman ini harus *non-revolving*. Pada *cash flow lending*, bank ingin segera seluruh pokok pinjaman lunas pada akhir priode pinjaman. Oleh karena itu, pada *cash flow*

⁵²Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Credit (Account) Officer*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.180.

⁵³Ace-grup, "*Bankers Guide to Secure Lending*", h. 4

lending harus diatur agar terdapat pencicilan (pelunasan) pokok pinjaman.⁵⁴ Dapat diambil kesimpulan bahwa *cash flow lending* merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh bank yang biasanya jangka panjang dan dicicil dari waktu ke waktu yang suatu saat pinjamannya menjadi nol. Kapan fasilitas jangka panjang akan diberikan bank kepada nasabah, baik itu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Tujuan pinjaman *cash flow lending* ialah untuk menyediakan pembiayaan eksternal untuk kebutuhan permanen, ini akan mendukung atau meningkatkan arus kas masuk bersih internal dari operasi yang menguntungkan.⁵⁵

3. *Asset Protection Lending*

Pemberian kredit dengan prinsip ini bank tidak mengharapkan *permanent current asset*. Pinjaman ini bersifat *revolving* yang mungkin dapat menjadi *evergreen loan* pokok pinjaman akan lunas di akhir periode. Karena, yang dibiayai adalah (pinjaman yang terus-menerus). Pemikiran ini mengikuti prinsip akuntansi *going concern*, yakni bisnis akan terus berlangsung. Sumber pengembalian pinjaman berasal dari menurunnya tingkat penjualan. Atau, perusahaan tidak tumbuh agresif. Kedua hal tersebut membuat *internal cash flow* berlebih dan dapat melunasi pinjaman. Sumber pelunasan yang lain tentu saja berasal dari dana segar pemilik bisnis. Misalnya, penyeteroran modal tambahan yang merupakan dana segar untuk perusahaan (bisnis). Mengikuti prinsip pemberian kredit ini, sejauh debitur memenuhi kewajiban bunga dan biaya-biaya kredit secara teratur, itu sudah cukup. Jangan dipusingkan dengan masalah pengembalian pokok.

⁵⁴Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Credit (Account) Officer*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.184.

⁵⁵Ace-grup, “*Bankers Guide to Secure Lending*”, h. 5.

4. Perbedaan *Asset Conversion Lending*, *Asset Protection Lending*, *Cash Flow Lending*

Setiap pemberian pembiayaan harus selalu dikaitkan dengan tujuan penggunaannya, maka dalam menyusun *lending rationale* yang tepat, harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan debitur. Maka dari itu masing-masing *lending rationale* mempunyai perbedaan, sebagai berikut :

Tabel 4
Asset Conversion Lending, Asset Protection Lending, Cash Flow Lending

Jenis <i>Lending Rationale</i>	Jangka Waktu Pelunasan	Sumber Pembayaran	Penyelesaian Pembiayaan	Kontrol
<i>Asset Conversion Lending</i>	Pembiayaan jangka pendek, bersifat musiman.	Uang tunai diterima dari sukses penyelesaian konversi aset siklus pembiayaan.	Dilunasi pada akhir periode.	Pembiayaan jangka pendek, Meninjau situasi sebelum pemberian kredit kembali
<i>Cash Flow Lending</i>	Pembiayaan jangka panjang	Uang tunai dari keuntungan dihasilkan dan dipertahankan di bisnis dari waktu ke waktu.	Dilunasi pada akhir periode, dapat dicicil karena pembiayaan jangka panjang.	Perjanjian dalam Pinjaman berjangka persetujuan untuk melestarikan atau meningkatkan keuangan kondisi

<i>Asset Protection Lending</i>	<i>Evergreen</i> pembiayaan, tingkat permanen aset kerja.	Jika perlindungan aset adalah alasan utama, maka pembayaran dilakukan dengan menjaga pertumbuhan aset. Juga dapat melalui modal pemilik melalui tambahan modal ke perusahaan agar aset tetap terjaga.	Ketidakmampuan untuk menghasilkan keuntungan dan untuk pertahankan kondisi keuangan/aset. Bank tidak berharap untuk dilunasi, perusahaan hanya diwajibkan membayar bunga dan operasional.	Permintaan atau jangka pendek asetcatatan. Keamanan dan layak dokumentasi. Batasan hutang dan perjanjian dimana berlaku.
---------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Ace Global Depository

F. Asset Protection Lending Rationale

Dari berbagai kategori *lending rationale*, salah satunya ialah *asset protection lending rationale*, yang merupakan pemikiran bank syariah dalam menilai debitur untuk mengembalikan pinjamannya. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank selalu melakukan analisis dalam menilai kemampuan calon debitur, untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Terlebih pada pembiayaan *asset protection lending* yang berfokus pada pembiayaan modal kerja permanen.

1. Definisi *Asset Protection Lending Rationale*

Asset protection lending rationale adalah konsep pinjaman yang didasarkan pada aset teridentifikasi yang akan dilikuidasi sebagai sumber arus kas untuk penyelesaian pinjaman.⁵⁶ *Asset protection lending* merupakan pembiayaan dengan skala besar yang permanen namun menggunakan fasilitas jangka pendek. Kebutuhan permanen ini umumnya berhubungan dengan suatu tingkat kebutuhan modal kerja. Jadi, APLR memadukan karakteristik *asset conversion lending* (fasilitas jangka pendek) dengan *cash flow lending* (kebutuhan permanen) menjadi suatu bentuk pinjaman yang berbeda dengan *asset conversion lending* dimana kebutuhan pinjaman bersifat sementara dan pelunasan berasal dari selesainya AC Cycle. APLR merupakan pendanaan dari AC Cycle yang berulang-ulang secara permanen terus-menerus. Dengan demikian, Dalam praktik perbankan konvensional dikenal istilah Kredit Modal Kerja Permanen (KMLP) dan diatur dalam SEBI Nomor 10/18UPK Tahun 1977.⁵⁷ APLR juga mengharuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak bank harus secara akurat mengetahui bahwa nilai likuiditas aset yang dibiayai (jika dijual atau dilikuidasi) dapat menutupi seluruh nilai pinjaman.
- b. Bank harus berstatus sebagai “*senior creditor*”.
- c. Status hukum jaminan harus jelas berada pada pihak bank.

Meskipun pada umumnya APLR memiliki jaminan, bukan berarti bahwa jaminan tersebut merupakan sumber pembayaran. Jaminan dalam hal ini hanya dipakai sebagai perlindungan terhadap risiko pinjaman. Contoh-contoh penggunaan APLR:

- a. Pembiayaan modal kerja permanen misalnya: *wholesaler*, perusahaan export-import, bank, *finance*

⁵⁶Kenny Tay, *Corporate and Business Lending: Setting the Standards*, (Singapore: 2016) h. 105.

⁵⁷Alfianila, Rully, T., Rifqy, T., “Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* Pada Pembiayaan Korporasi di Bank Syariah”, Vol. 4 No. 1, 2018, h. 22.

company, security broker, Account receivable financing, Warehouse receipt, dan lain-lain.

- b. APLR dapat dipakai sebagai *rationale* kedua. Misalnya, dalam suatu *cash flow lending* dengan jangka waktu yang panjang dimana kemungkinan resiko cukup besar.

Sumber pengembalian pinjaman berasal dari penurunan tingkat *permanent current asset*. Hal tersebut umumnya berarti penurunan tingkat penjualan. Atau, perusahaan tidak tumbuh agresif. Kedua hal tersebut akan membuat *internal cash flow* berlebih dan dapat melunasi pinjaman. Sumber pelunasan yang lain tentu saja berasal dari dana segar pemilik bisnis. Misalnya, penyeteroran modal tambahan yang merupakan dana segar untuk perusahaan (bisnis). Dalam jenis kredit ini, sejauh kreditur mampu memenuhi biaya kredit dan bunga secara teratur, maka pengembalian pokok tidak begitu dipikirkan.⁵⁸

Dalam kasus pemberian pinjaman dimana arus kas yang diharapkan dari peminjam mudah berubah atau tidak pasti, bank pemberi pinjaman kemudian dapat mengguhakan alasan *asset protection lending* sebagai konsep keamanan. Dalam situasi ini, arus kas dari bisnis tetap menjadi sumber utama pembayaran kembali pinjaman, tetapi jika gagal, aset kewananan kemudian menjadi sumber pembayaran kembali. Karena aset jaminan menjadi sumber pembayaran kembali pinjaman serta perlindungan pinjaman, kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut relevan dan memiliki nilai yang memadai untuk memenuhi persyaratan ini dilakukan dengan melakukan analisis likuidasi aset.⁵⁹

2. Karakteristik *Asset Protection Lending Rationale*

Pembiayaan *asset protection lending rationale* merupakan pembiayaan yang bersifat modal kerja permanen namun *revolving*. Berikut adalah karakteristik APLR adalah:

⁵⁸Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Credit (Account) Officer*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.183

⁵⁹Kenny Tay, *Corporate and Bussiness Lending: Setting the Standars*, (Singapore: 2016) h. 106.

- a. Tujuan pinjaman, untuk membiayai modal kerja yang permanen.
- b. Sumber pelunasan, pinjaman tidak diharapkan untuk dilunasi secara penuh selama perusahaan masih beroperasi secara baik. Dalam kondisi yang buruk, aset yang dibiayai dapat dilikuidasi untuk menutupi pinjaman secara penuh.
- c. Risiko, menurunnya nilai aset sehingga tidak cukup untuk menutupi jumlah pinjaman.
- d. Perlindungan, nilai dan likuiditas dari aset yang dibiayai.
- e. Struktur pinjaman dan pengawasan, fasilitas memiliki sifat jangka pendek yang diperpanjang (*rollover*) terus-menerus. Pengawasan terhadap nilai aset serta kemampuan operasional perusahaan dilakukan terus-menerus.

Contoh kasus APLR: Tuan A memiliki kebijakan memelihara tingkat persediaan barang selama 1 bulan. Berapa dana tambahan yang dibutuhkan bila Tuan A bermaksud meningkatkan penjualannya sebesar Rp. 1000 per bulan?. Diketahui, harga pokok penjualan adalah 80% dan seluruh penjualan dilakukan secara tunai.⁶⁰

Tabel 5
Contoh Kasus APLR

Penjualan per tahun	12xRp1.000	Rp. 12.000
Harga pokok penjualan	80%xRp 12.000	Rp. 9.600
Laba kotor		Rp. 2.400
Biaya operational	5%xRp. 12.000	(Rp. 600)
Laba bersih sebelum bunga & pajak	20%xRp.800	(Rp. 160)
Labar bersih sebelum pajak		Rp. 1.640

Sumber: Analisis Kredit untuk *Credit (Account) Officer*

⁶⁰Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Credit (Account) Officer*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.184.

Penyelesaian : Bila Tuan A tetap memelihara tingkat persediaan selama 1 bulan, peningkatan penjualan sebesar Rp. 800 ($80\% \times \text{Rp } 1.000$). Persediaan Rp 800 ini akan terus ada. Karena, bila berada di bawah tingkat tersebut, perputaran persediaannya akan berkurang menjadi di bawah 1 bulan. Apabila bank bermaksud memberi pinjaman sebesar Rp. 800 dengan tingkat bunga 20% p.a., apakah Tuan A layak menerima kredit tersebut? Diketahui bahwa biaya operasional adalah 5% dari penjualan. Untuk mengetahui kemanapun tersebut, dilakukan proyeksi Perhitungan Rugi/Laba Tuan A sebagai berikut:

Perhitungan di atas hanya memperhatikan hasil dari peningkatan penjualan saja. Tampak bahwa Tuan A sanggup membayar bunga dengan baik. *Interest coverage ratio*-nya mencapai 11,25 kali. Itu adalah indikasi yang cukup kuat dan bagus. Dengan memerhatikan hal tersebut maka pinjaman *revolving* sebesar Rp. 800 kepada Tuan A dapat diberikan.

3. Waktu yang Tepat dalam Memberikan Pembiayaan Berdasarkan *Asset Protection Lending Rationale*

Sebelum memberikan pinjamannya bank mempunyai kriteria yang harus dimiliki oleh bisnis calon nasabah, diantaranya:⁶¹

a. Bisnis Pedagang

Usaha/bisnis yang akan diberikan pembiayaan menggunakan fasilitas *asset protection lending*, sebagai berikut:

- 1) Dimana bisnis bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual, pemasok dan produsen, penabung dan investor, dll. *asset protection lending* kemudian diperlukan untuk mendanai *permanent current asset*.
- 2) *Financial leverage* adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan

⁶¹ Ace-grup, “*Bankers Guide to Secure Lending*”, h. 9.

keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. *Financial Leverage* yang tinggi yang merupakan karakteristik dari bisnis ini menyiratkan risiko tinggi bagi pemberi pinjaman.

- 3) Bank, akan memberikan pinjaman berdasarkan alasan berbasis aset, ketika yakin akan kelangsungan bisnis akan terus berjalan dan jika kualitas aset sedemikian rupa sehingga, jika dilikuidasi, nilai realisasi bersih akan cukup untuk membayar pinjamannya ke bank.
- b. Ketidakpastian tentang kemampuan peminjam untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjamannya, di mana tingkat pinjaman sangat tinggi sehingga ada kondisi keuangan yang tidak stabil dalam waktu dekat. Sedangkan bisnis harus terus berjalan, kemudian bank akan mengambil keamanan aset dengan nilai likuidasi yang memadai untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
- c. Bank hanya memberikan pinjaman kepada bisnis yang sudah memiliki reputasi yang baik, jika bank memiliki alasan untuk meragukan potensi arus kas perusahaan, bank tidak akan memberikan pinjamannya. Dengan contoh:
 - 1) Pabrik pemula, di mana bank dapat membiayai pabrik, peralatan, atau investasi kerja permanen dengan pinjaman berjangka, mengharapkan keuntungan yang cukup dari waktu ke waktu untuk membayar kembali hutang, tetapi karena ketidakpastian perusahaan baru, mengambil keamanan dalam aset perusahaan untuk memastikan pengembalian jika perusahaan terbukti tidak menguntungkan.
 - 2) Perusahaan yang baru-baru ini mengalami masalah arus kas yang menyuntikkan ketidakpastian baru ke dalam prospek profitabilitasnya di masa depan

hingga tingkat yang didiskualifikasi jika untuk pertimbangan pinjaman berjangka tanpa jaminan.

4. Macam-Macam Pembiayaan *Asset Protection Lending Rationale*

Beberapa kategori pembiayaan *asset protection lending rationale* yang dilakukan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya dibagi beberapa macam, yaitu :⁶²

- a) *Account receivable financing*, adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dari bank dalam rangka men-support kegiatan transaksi perdagangan barang maupun jasa, dimana yang mendapatkan fasilitas ini adalah nasabah yang dalam perdagangan bertindak sebagai produsen (*supplier*) ataupun penjual, fasilitas ini memberikan pembiayaan modal “cash” kepada produsen atau penjual tersebut dalam rangka pemenuhan barang dan jasa yang dipesan oleh pembeli atau *buyer* nya. uang pinjaman yang dicairkan bank tersebut digunakan oleh si produsen atau penjual tersebut sebagai modal untuk memproduksi barang atau jasa dalam rangka pemenuhan pesanan dari *buyer* atau pembeli nya, ataupun uang *cash* tersebut dapat digunakan produsen/penjual/*supplier* tersebut sebagai modal untuk memproduksi barang selanjutnya, sehingga *cash flow* produsen/penjual/*supplier* tersebut tidak terganggu.⁶³
- b) *Warehouse receipt*, dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu namun yang membedakan dengan pembiayaan lain.⁶⁴ Contoh: beli stok barang digudang, beli kemudian beli stok lagi, baru jual, yang artinya akan terus berlangsung.

⁶³International Banking Operations, *Account Receivable Financing*, <https://ibankingops.wordpress.com/2014/07/06/29/>, (Diakses pada 16 Januari 202, 21.00)

⁶⁴Wikipedia, *Resi Gudang*, https://id.wikipedia.org/wiki/Resi_gudang, (Diakses pada 17 Januari 2021, 13.00).

- c) *Trust receipt*, merupakan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah (importir) untuk melunasi kewajiban tagihan impor yang datang (*post import financing*).⁶⁵
- d) *Commercial financing* (bersifat *revolving credit*).
- e) *Factoring* (anjak piutang) , suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha yang menggadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja.⁶⁶

Pembiayaan *asset protection lending* yang dilakukan setiap bank berbeda-beda sesuai peraturan dan kemampuan bank, Pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri KC Diponegoro Bandar Lampung adalah *warehouse receipt*, dimana bank memfasilitasi pembiayaan untuk memenuhi keperluan stok barang.

5. Keistimewaan *Asset Protection Lending Rationale*

Struktur pembiayaan yang tepat bukan saja menguntungkan bank, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Struktur pembiayaan membuat struktur keuangan perusahaan menjadi lebih kokoh dan efisien. Pertimbangan utama dalam penentuan struktur pembiayaan adalah jenis aktiva yang dibiayai. Secara umum, aktiva suatu perusahaan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *fixed asset*, *permanen current asset*, dan *fluctuative current asset*. Dalam struktur pembiayaan, kebutuhan jangka pendek harus dibiayai dengan dana jangka pendek, sedangkan kebutuhan jangka panjang harus dibiayai dengan dana jangka. Setiap pemberian pembiayaan harus dikaitkan dengan tujuan penggunaannya. Tujuan ini selalu dikaitkan dengan jenis aktiva yang dibiayai . sehubungan dengan hal tersebut, ada

⁶⁵CIMB Niaga, *Trust Receipt*, <https://www.cimbniaga.co.id/id/business/layanan/trade-finance/import-trades-at-cimb/trust-receipt> (Diakses pada 17 Januari 2021, 19.00).

⁶⁶Wikipedia, *Anjak Piutang*, https://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang (Diakse pada 17 Januari 2021, 19.30).

tiga dasar pemikiran dalam memberikan pembiayaan yaitu *lending rationale*.⁶⁷ Tujuan Utama *lending rationale*, yaitu:

- a. Identifikasi risiko dalam situasi pinjaman.
 - 1) Sumber uang tunai yang digunakan untuk melunasi pinjaman bank. Sumber pembayaran kembali secara spesifik bergantung pada tujuan pinjaman, atau penggunaan dana pinjaman.
 - 2) Kebutuhan pembiayaan khusus memunculkan sifat risiko kepada pemberi pinjaman, yang harus yakin untuk mengevaluasi dengan cermat faktor-faktor yang akan mengurangi risiko tersebut dan melindungi mereka dari kerugian. Sumber pembayaran kembali, tujuan pinjaman, dan risiko menentukan bentuk perlindungan, pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh bank.
- b. Menarik kesimpulan tentang kemungkinan pembayaran kembali.
- c. Membuat rekomendasi tentang jenis dan struktur fasilitas pinjaman yang tepat.

Lending Rationale dibagi menjadi 3 jenis, yaitu *asset conversion lending*, *cash flow lending*, dan *asset protection lending*, dimana masing-masing jenis tersebut untuk membiayai 3 pembiayaan yang berbeda sesuai kebutuhan. *Asset protection lending* merupakan pembiayaan yang memiliki keuntungan yang besar bagi bank karena bersifat *revolving* atau *evergreen* namun memiliki risiko yang tinggi, oleh karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan modal kerja yang sifatnya permanen maka bank menetapkan *Asset Protection Lending Rationale* atau penilaian terhadap kapasitas dari debitur dalam menjalankan kewajibannya dengan pertimbangan berbagai unsur. APLR disetiap bank ditetapkan berbeda-beda namun masih berdasarkan standar utama yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

⁶⁷Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Credit (Account) Officer*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.175.

hanya saja bank syariah menyesuaikan penetapannya sesuai berdasarkan kegiatan usaha dan keadaan yang dihadapi oleh bank tersebut.⁶⁸

“setiap tahunnya risiko kredit terus berkembang, risiko dimasa lalu tentu berbeda risiko dimasa kini begitu pun dimasa depan, maka dari itu perlu adanya pengembangan untuk analisis risiko kredit, prinsip 5C yang ada saat ini tidak bisa dipakai untuk pembiayaan modal kerja jumlah besar yang tingkat risikonya lebih kompleks, prinsip 5C tetap digunakan namun membutuhkan perkembangan, dengan ini kita membutuhkan *lending rationale*, untuk menilai/menganalisis kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya, sesuai kebutuhan, dana jangka pendek (ACL), jangka panjang (CFL), percampuran jangka panjang dan jangka pendek (APLR). Yang dibuat sesuai kebutuhan masing-masing jenis pembiayaan”. Susanto Onie, *Managing director Indonesian Institute of management*.

Dari pemaparan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa kelebihan dari *asset protection lending rationale* ialah analisis atau pemikiran bank yang memiliki kemampuan menilai nasabah sesuai sumber pembayaran kembali secara spesifik bergantung pada tujuan pinjaman, atau penggunaan dana pinjaman nasabah, jenis pembiayaan ini untuk modal kerja *permanent current asset*. Maka dari itu bank membutuhkan *asset protection lending rationale* bersifatnya fleksibel yang dapat mengikuti perkembangan risiko yang akan terjadi dan membaca kemungkinan risiko lebih kompleks dari berbagai faktor seperti manajemen perusahaan, kondisi pasar, baik bersifat internal maupun eksternal. Peraturan yang berbeda-beda dikarenakan bank membuat peraturan sendiri-sendiri sesuai yang dibutuhkan bank tersebut, namun tetap pada standar peraturan yang berlaku.

⁶⁸Alfianila, Rully, T., Rifqy, T., “Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* Pada Pembiayaan Korporasi di Bank Syariah”, Vol. 4 No. 1, 2018, h. 10.

G. Dasar Hukum *Asset protection Lending Rationale*

Asset protection lending rationale merupakan penilaian dan pemikiran bank terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan penerapan APLR pada masing-masing bank berbeda sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh lembaga tersebut. Al Qur'an tidak secara langsung membicarakan mengenai APLR meski di sana ada sejumlah acuan tentang riba, *maisir*, *gharar*, produk halal, dan prinsip kehati-hatian. Demikian pula, tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada APLR. Namun terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian dengan lafadz yang berbeda namun secara umum maknanya sama, diantaranya adalah :

1. Terhindar Unsur Riba, *Maisir* dan *Gharar* dalam *Asset Protection Lending Rationale*
 - a. Terhindar dari unsur riba

Riba secara bahasa adalah tambahan. Riba adalah tambahan, maksudnya pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *muamalah* dalam Islam. Riba juga merupakan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi.⁶⁹ Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dan yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Riba terjadi di bank syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.⁷⁰

⁶⁹ Yarmunida, Miti, *Dimensi Syariah Compliance pada Operasional Bank Syariah*. AL-INTAJ Volume 04 Nomor 01, 2018, 143.

⁷⁰ *Ibid.*

Pada konsep *asset protection lending rationale*, riba dapat terjadi apabila adanya tambahan pengembalian pinjaman yang diminta oleh bank kepada nasabah melebihi perjanjian awal. Konsep ini diluar dari sistem bagi hasil yang ditetapkan bank, dimana kesepakatan awal dilakukan suka sama suka. Di dalam syariat Islam, riba adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syariah, hal itu sudah dijelaskan di dalam al-Quran surat Al-Imran ayat 130 ⁷¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Imran:130)

Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram, maka dalam surat al-Imran ayat 130 Allah SWT melarang kita untuk memakan riba secara berlipat ganda, yang artinya segala keuntungan atau kelebihan atas berbagai pinjaman yang mengandung bunga dilarang. Secara keseluruhan, keadilan sosio ekonomi dan distribusi, keseimbangan antargenerasi, instabilitas perekonomian, dan kehancuran ekologis dianggap dasar pengharaman riba.

b. Terhindar dari unsur *maisir*

Maisir dalam bahasa Arab adalah *qimar* yang berarti judi. *Maisir* adalah suatu transaksi yang

⁷¹ Asy-Syifa, *Al-Quran dan Terjemahan*, , (Jakarta: CV. Raja Qur'any, 2012), QS. Ali-Imran, h.66.

digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maisir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak manggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban yang lain.⁷² Dalam konsep *asset protection lending rationale*, hal ini diperuntukan untuk dana yang telah dihimpun agar tidak dimanfaatkan untuk produk yang mengandung sifat *maisir* atau spekulatif. Keharaman maisir tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90:⁷³



"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". (Q.S Al-Maidah:90)

Ayat tersebut berisi penegasan bahwa meminum khamar dan berjudi adalah perbuatan setan yang harus dijaui yang merupakan dosa besar. Meskipun memiliki manfaat, namun memiliki mudharatnya lebih banyak. Tentu hal ini bertolak belakang dengan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam Islam, maka dari itu

⁷² Ibid.

⁷³ Asy-Syifa, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Raja Qur'any, 2012), QS. Al-Maidah, h.123.

bank syariah dalam menjalankan bisnisnya harus menghindari hal-hal yang telah dilarang oleh Islam.

c. Terhindar dari unsur *gharar*

Menurut ahli fiqih, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Imam Nawawi menjelaskan hadist ini bahwa prinsip penting dalam berbisnis yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas menurutnya di antara contoh *gharar* yaitu, menjual buah jika belum matang berarti itu *gharar*, karena masih ada kemungkinan buah itu akan matang dengan baik atau tidak. *Gharar* terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti menjadi tidak pasti.⁷⁴ Dalam konsep *asset protection lending rationale*, untuk menghindari *gharar* dengan cara menganalisa pembiayaan untuk mendapatkan informasi debitur secara jelas tentang produk yang dibiayai. Hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *al-hashah* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*.” (HR Muslim No. 2783)

Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut *sunnatullah* yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola. Dalam praktik *asset protection lending* yang membiayai *permanent current asset* maka perbankan

⁷⁴ Ibid.

syariah bank wajib menghindari suatu bisnis yang mengandung unsur ketidakjelasan seperti ketidakjelasan kualitas barang/produk yang dibiayai kuantitas jumlah pembiayaan dan lain-lain.

2. Terhindar dari Haram Zatnya

Al- Quran memiliki banyak peranan untuk manusia seperti sumber panduan hidup, penjelas tujuan hidup, mengisi jiwa yang kosong dan termasuklah menerangkan apa yang memberi maslahat serta mengelak mudarat bagi manusia sebagai dasar hukum. Termasuk aturan jenis pembiayaan yang dilakukan bank syariah haruslah sesuai dengan prinsip Islam, dimana sebuah transaksi tidak diperbolehkan karena obyek (barang dan/jasa) yang ditransaksikan dilarang, misalnya khamr, babi, darah, bangkai dan sebangsanya. Seperti firman Allah SWT surat An-Nahl ayat 115.⁷⁵



Artinya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S An-Nahl:115)

Halal dan haram adalah persoalan prinsipil. Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah dosa,

⁷⁵ Asy-Syifa, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Raja Qur'any, 2012), QS. An-nahl, h.280.

setiap daging yang tumbuh dari para pihak yang terlibat dalam membiayai barang-barang haram tidak dibenarkan oleh Islam dengan jalan apapun. Implementasi *asset protection lending* dalam membiayai stok persediaan barang dagang wajib menghindari dan memastikan bahwa pembiayaan yang mereka berikan bukan untuk mendanai barang-barang yang haram zatnya.

3. Menerapkan Manajemen Risiko Berdasarkan Prinsip Syariah
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI.2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Adapun risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat berbentuk finansial maupun nonfinansial. Seluruh bank wajib melakukan proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko.⁷⁶

Asset protection lending rationale sebagai dasar pemikiran bank terhadap nasabah dalam mengembalikan pinjamannya, wajib menganalisa kemampuan nasabah berdasarkan peraturan yang ada, dengan dasar prinsip etika Islam yaitu: Tauhid, adil, kehendak bebas, tanggungjawab, jujur. Proses analisa ini telah diatur dalam Firman Allah SWT, surat Al-Maidah ayat 49:⁷⁷

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ^ط

⁷⁶ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hal. 49

⁷⁷ Asy-Syifa, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Raja Qur'any, 2012), QS. Al-Maidah, h.116.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S Al-Maidah:49)

Mengelola risiko dengan fitrah dan bagian dari ibadah salah satu ikhtiar dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dari ayat diatas bahwa manajemen risiko yang diterapkan bank syariah mampu melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi, pengukuran dan pengelolaan risiko secara hati-hati tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

4. Peraturan DSN Mengenai Asset Protection Lending Rationale

Pratik *asset protection lending rationale* pada perbankan syariah menyangkut 2 akad yaitu, mudharabah dan musyarakah yang ditetapkan sesuai spesifikasi kebutuhan modal kerja, maka dalam praktiknya untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam, maka bank syariah mengikuti peraturan yang telah berlaku yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dimana DSN menetapkan fatwa tentang akad-akad yang ada dibank syariah untuk dijadikan pedoman oleh LKS, yaitu:

- a. Pembiayaan Mudharabah NO: 07/DSN-MUI/IV/2000⁷⁸

1) *Pertama* : Ketentuan Pembiayaan:

- a) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat

⁷⁸ DSN-MUI, *Pembiayaan Mudharabah NO: 07/DSN-MUI/IV/2000*. (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional, 2000), hal 2-4.

dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
 - j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- 2) *Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:*
- a) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
 - b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - d) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, bagian keuntungan proporsional bagi setiap

pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan, pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

- 3) *Ketiga* : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:
 - a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
- b. Musyarakah NO: 08/DSN-MUI/IV/2000⁷⁹
 - 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

⁷⁹ DSN-MUI,, *Pembiayaan Musyarakah NO: 08/DSN-MUI/IV/2000*. (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional, 2000), hal 2-4.

- e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - d) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - e) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - f) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - g) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh

keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- h) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - i) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - j) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 4) Biaya Operasional dan Persengketaan
- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

H. Risiko Perbankan Syariah

Praktik manajemen risiko menjadi perhatian besar terutama di Indonesia dalam pengelolaan perbankan semenjak krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan tahun 1997. Pada saat itu, banyak perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas akibat kurangnya kehati-hatian dalam melaksanakan operasional perbankan. Hal inilah yang memunculkan pentingnya pengelolaan risiko di lembaga keuangan non-bank lainnya.

1. Definisi Risiko

Risiko adalah kejadian yang memiliki potensi baik hal yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif

pada penghasilan dan permodalan lembaga keuangan.⁸⁰ Risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu sebagai berikut:⁸¹

- a. Risiko bisnis, yaitu muncul karena proses bisnis yang dilakukan bank, seperti kesalahan saat menyusun perencanaan bisnis, kurangnya informasi saat pengambilan keputusan, atau kurang optimalnya pengelolaan aset bank.
- b. risiko non-bisnis, yaitu muncul dari berbagai faktor yang tidak berkaitan dengan bisnis, tetapi dampaknya akan memengaruhi bisnis, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusakan, dan sebagainya.

Munculnya risiko dapat dipicu oleh faktor likuiditas, solvabilitas, gejolak ekonomi, dan perkembangan pasar perbankan. Oleh karena itu untuk melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur, bank syariah perlu dirgulasi.

2. Identifikasi Risiko

Risiko yang terjadi diperbankan sangat mempengaruhi kinerja bank, maka dari itu setiap perbankan menerapkan manajemen risiko. Manajemen Risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Perbedaan mendasar antara Bank Islam dengan Bank Konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan

⁸⁰Alfianila, Rully, T., Rifqy, T., "Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* Pada Pembiayaan Korporasi Di Bank Syariah", Vol. 4 No. 1, 2018, h. 20.

⁸¹Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), h. 5.

tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank Islam yang meliputi:⁸²

- a. *Pertama*, proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank Islam dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi dan pihak ketiga dan proses transaksi valuta asing.
- b. *Kedua*, proses manajemen keunikan manajemen bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.
- c. *Ketiga*, sumber daya manusia. Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.
- d. *Keempat*, teknologi. Keunikan bank Islam dalam bidang teknologi terlihat *Business Requirement Specification* (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan *Business Requirement Specification* (BRS) dana pihak ketiga.
- e. *Kelima*, kerusakan. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.

3. Antisipasi Risiko

Dalam mencegah terjadinya risiko yang mungkin terjadi bank perlu mengantisipasi risiko, yang bertujuan untuk:⁸³

- a. *Preventive*. Dalam hal ini, Bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Di

⁸²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 256.

⁸³*Ibid.*

samping itu, bank Islam juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya.

- b. *Detective*. Pengawasan dalam bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atau suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak.
- c. *Recovery*. Koreksi atas suatu Kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.
- d. *Monitoring Risiko*. Aktivitas monitoring Bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan DPS. Secara sederhana, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.

4. Perbankan dan Pengelolaan Risiko

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak surplus dan pihak defisit. Hal ini tentu menjadikan bank menghadapi risiko dalam kegiatan operasional bank yang dilakukan. Bank mengimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk simpanan dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun) kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan (mayoritas jangka panjang). Hal ini menimbulkan ketidakcocokan jangka waktu yang menimbulkan risiko pada operasional perbankan. Sekuat apapun perbankan, akan jatuh dalam waktu singkat apabila mayoritas nasabah menarik dananya pada waktu yang sama (bank *rush*).

Terdapat lima masalah yang dihadapi oleh bank ketika menyalurkan dananya, yaitu:⁸⁴

⁸⁴ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hal.90

- a. Masalah ketidakpastian kondisi pasar yang akan mempengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan dana.
- b. Adanya kemungkinan perbedaan nilai jual agunan (*rahn*) pada waktu kontrak dan ketika termnasi. Hal ini mengarah pada risiko tidak kembalinya modal jika debitur mengalami gagal bayar.
- c. Masalah kredibilitas informasi yang diberikan debitur pada waktu pengajuan proposal pembiayaan. Masalah ini memicu terjadinya ketidak seimbangan informasi antara bank dan debitur. Kondisi ini dapat menyebabkan bank mengalami salah pilih debitur dan/atau kesalahan dalam membuat perjanjian kredit, seperti salah dalam menetapkan limit (*pagu*) pinjaman, jangka waktu, margin jual beli serta bentuk dan jaminan yang diminta.
- d. Masalah *granularity* akibat banyaknya debitur yang dibiayai namun nilainya kecil-kecil.
- e. Masalah ketidakmampuan bank dalam membedakan sebab terjadinya bayar debitur. Kegagalan bayar dapat disebabkan oleh faktor kemampuan keuangan (*ability to pay*) atau ketiadaan iktikad baik dari debitur untuk mau membayar (*willingnes to pay*).

Kondisi ketiadaan iktikad baik ini muncul karena adanya moral *hazard* dari debitur. Moral *hazard* adalah kondisi yang bersumber dari sikap mental seseorang yang sifatnya ‘negatif’ dan ‘disengaja’ untuk menimbulkan potensi kerugian bagi pihak lain, namun menguntungkan dirinya. Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank. Proses penyusunan ini harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait. kebijakan manajemen risiko pada bank syariah setidaknya harus memuat hal-hal berikut:

- a. Penetapan risiko yang berkaitan dengan produk dan transaksi perbankan.
- b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.
- c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko, artinya toleransi risiko merupakan potensi yang dapat diserap oleh permodalan bank.
- d. Penetapan penilaian peringkat risiko, yang merupakan dasar bagi bank untuk mengategorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko bank dikategorikan menjadi lima peringkat, yaitu *low*, *low to moderate*, *moderate*, *moderate to high*, *high*.
- e. Penyusunan rencana cadangan (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk.
- f. Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko.

Namun sejatinya, manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah harus dilihat dari proses pembiayaan itu sendiri. Sebab, jika pembiayaan itu disalurkan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank syariah maka risiko pembiayaan dapat ditekan dengan baik.

I. Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* pada Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Dalam implemenatasi *asset protection lending rationale* bank tetap menggunakan analisa dasar terlebih dahulu yaitu analisa 5C

dan 7P, sebagai standar manajemen risiko perbankan, sebelum melakukan analisa yang lebih dalam terkait *asset protection lending rationale*.

1. Analisis prinsip 5C dan 7P

Pembiayaan yang berdasarkan prinsip *asset protection lending rationale*, sebelum suatu fasilitas pembiayaan disalurkan, maka bank harus memiliki keyakinan bahwa pembiayaan diberikan akan kembali seluruhnya. Keyakinan bank syariah terhadap debiturnya diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan sebelum menyalurkan pembiayaan sebelum pembiayaan. Analisis yang dilaksanakan Bank kepada calon debitur/nasabah untuk mendapat keyakinan dengan cara menerapkan prinsip 6C dan 7P dengan pemaparan:

a. Analisis 5C adalah:

- 1) *Character* ialah sifat atau karakter seseorang harus dapat dipercayai. Bank melakukan penilaian terhadap sifat dan watak calon debitur/nasabah dengan melihat reputasi nasabah artinya debitur selalu menepati janji dan tidak terlibat dengan hal kriminalitas.
- 2) *Capacity* adalah analisis untuk mencari tahu kemampuan nasabah. Bank harus mengetahui dengan pasti atas kemampuan calon debitur/nasabah dengan melakukan usahanya dari setiap waktu ke waktu.
- 3) *Capital* merupakan merupakan analisis untuk mengetahui keadaan kekayaan yang dimiliki oleh kormersial yang akan menerima pembiayaan. Bank harus mengetahui modal calon debitur selain pada besarnya modal juga pada struktur modal yang dimiliki. *Capital* dari debitur dapat ditunjukkan dari laporan keuangan perusahaan.

- 4) *Condition* merupakan keadaan ekonomi dari wilayah bisnis yang di berikan. Bank dalam pemberian pembiayaan juga harus melihat keadaan ekonomi saat ini dan beberapa waktu kedepan agar risiko yang didapat dapat diminimalisir.
 - 5) *Collateral* ialah agunan/jaminan yang diberikan calon debitur/nasabah baik jaminan yang memiliki sifat fisik atau nonfisik. Bank juga harus melihat jaminan yang dimiliki oleh calon debitur/nasabah. Walaupun jaminan tersebut hanya dapat dieksekusi dengan keadaan yang paling akhir.
- b. Analisis 7P adalah:
- 1) *Personality* merupakan penilaian calon debitur/nasabah dari kepribadian sehari-hari maupun dimasa lalu juga meliputi sikap, tingkah laku, emosi dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya.
 - 2) *Parity* merupakan klasifikasi nasabah berdasarkan loyalitas, modal dan karakternya sehingga bank dapat menggolongkan nasabah pada golongan tertentu yang mempengaruhi fasilitas kredit yang berbeda dari bank. Bank menerapkan standar mengenai berapa dana yang harus didapatkan oleh calon debitur/nasabah.
 - 3) *Pupose* merupakan menilai dari tujuan dalam pengambilan pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam sesuai dengan kebutuhan. Bank membedakan pembiayaan sesuai kebutuhan.
 - 4) *Prospect* merupakan penilain bank pada usaha calon debitur/nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

Bank perlu melakukan penilaian ini terutama pada pembiayaan APLR karena bank harus menilai agar bank tidak merasa rugi.

- 5) *Payment* merupakan penilaian bank terhadap nasabah mengenai cara calon debitur/nasabah dalam pengembalian pembiayaan yang diberikan. Bank menilai sumber-sumber lain yang dimiliki oleh calon debitur/nasabah untuk memenuhi kewajibannya sampai perjanjian selesai.
- 6) *Profitability* merupakan penilaian bank pada calon debitur/nasabah dalam mencari keuntungan dalam usaha yang dijalankannya. Bank dapat menilai *profitabilitas* calon debitur/nasabah dengan mengukur keuntungan untuk usahanya dari waktu ke waktu.
- 7) *Protection* merupakan penilaian bank terhadap calon debitur/nasabah dalam menjaga pembiayaannya seperti dengan melakukan *cover* sehingga pembiayaan dapat aman.

Calon debitur/nasabah yang mengajukan pembiayaan syariah pada bank diharuskan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang bersangkutan dengan pembiayaannya dokumen tersebut merupakan bahan analisis diatas yang dilakukan oleh bank. Kelengkapan dokumen data dan informasi yang dibutuhkan oleh calon debitur/nasabah sebagai berikut:

- a. Informasi dan data umum nasabah yang meliputi legalitas permohonan pembiayaan, legalitas nasabah, legalitas usaha, data informasi keuangan, *Curriculum vitae* pengurus, susunan kepengurusan usaha, jumlah modal/saham yang dimiliki, hasil penilaian PROPER, daftar jaminan yang berupa barang, hasil BI *checking*, data dari rekan bisnis,

- laporan pengecekan langsung, surat pembayaran pajak, pengisian *checklist* APU dan PPT.
- b. Laporan akuntan dan *feasibility studi* yang meliputi laporan keuangan *audited* dengan spesifikasi kelengkapan laporan keuangan akurat.
2. Standar *Asset Protection Lending Rationale* di Bank Syariah

Kebijakan dalam meminimalisir risiko pembiayaan *permanen current asset* adalah *Asset Protection Lending Rationale* yaitu keyakinan bank atas kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Untuk meminimal risiko pembiayaan yang disalurkan, bank melakukan analisa terhadap pembiayaan pada calon nasabah/nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh bank. Penilaian bank kepada nasabah dilakukan dengan analisis sebelum pembiayaan dan pengawasan (*controlling*) saat pembiayaan telah di salurkan hingga pembiayaan tersebut selesai dilakukan.⁸⁵

- a. Analisis pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan, setiap permohonan yang diajukan oleh calon nasabah/nasabah dalam suatu pembiayaan bank harus menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan pemberian persyaratan berupa tertulis, lengkap, akurat dan obyektifitas dengan ketentuan:

- 1) Menilai secara seksama terhadap personal pemohon dengan melihat watak dan kemampuan pemohon berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan bisnisnya seperti reputasi nasabah/perusahaan dan profesionalisme pengurus/pemilik.

⁸⁵ Alfianila, Rully, T., Rifqy, T., "Implementasi *Asset Protection Lending Rationale* Pada Pembiayaan Korporasi Di Bank Syariah", Vol.4 No 1, 2018, h. 13.

- 2) Menganalisis manajemen bisnis/usaha yang dibiayai dengan melihat struktur organisasi perusahaan, perkembangan usaha dan grup perusahaan.
 - 3) Menggali semua informasi pemohon yang berkaitan dengan bidang usaha atau proyek yang akan di biayai.
 - 4) Menilai agunan (*collateral*) yang dijaminan pada bank syariah.
 - 5) Menilai risiko yang mungkin diambil oleh bank syariah pada pemberian pembiayaan.
- b. Pengawasan (*controlling*) pembiayaan setelah pembiayaan disalurkan Setelah pembiayaan diberikan bank syariah melakukan pengawasan pada proyek/usaha yang diberikan pinjaman dengan melakukan pengecekan pada laporan perusahaan dan kegiatan yang terjadi. Pengawasan dilakukan sebagai berikut:
- 1) Mengawasi kesesuaian proses pemberian pembiayaan dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, ketentuan internal bank yang berlaku, dan ketentuan perbankan yang berlaku.
 - 2) Mengawasi kesesuaian pemberian fasilitas pembiayaan dengan ketentuan berlaku untuk menilai kualitas analisis pembiayaan.
 - 3) Memantau perkembangan aktivitas keuangan nasabah termasuk pemantauan melalui kunjungan kepada nasabah dan memberikan peringatan mengenai penurunan kualitas pembiayaan.
 - 4) Mengawasi kesesuaian pelaksanaan penilaian kolektibilitas pembiayaan dengan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
 - 5) Melakukan pembinaan kepada nasabah untuk selalu memenuhi kewajibannya kepada bank.

- 6) Mengawasi pengelolaan nasabah bermasalah (dalam perhatian yang khusus, diragukan, kurang lancar dan macet).
- 7) Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah-nasabah besar tertentu.
- 8) Memantau cukupnya jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan.
- 9) Mengawasi pelaksanaan penatausahaan dokumen pembiayaan.
- 10) Melakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan pembiayaan yang ditawarkan pada nasabah.
- 11) Melakukan pemantauan terhadap perubahan yang menyolok baik dari segi finansial maupun non finansial, antara lain:
 - a) Nasabah lambat atau lalai memenuhi kewajiban-kewajiban.
 - b) Sering timbul penolakan cek/bilyet giro.
 - c) Penambahan hutang dagang dan persediaan barang yang cukup besar.
 - d) Perubahan dalam *product mix* maupun strategi pemasaran Manajemen yang selalu berubah-ubah.

Prosedur ini dilakukan agar bank dapat mengontrol risiko yang mungkin hadir dalam pembiayaan yang di salurkan. Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan rentang waktu satu sampai tiga bulan sampai pembiayaan tersebut dapat dicairkan. Waktu dalam pencairan tersebut digunakan bank untuk menganalisis perusahaan dengan mementingkan tujuh aspek yaitu aspek legal, karakter dan manajemen, *trext record*, tehnikal, pemasaran, keuangan, AMDAL sosial ekonomi dan agunan. Proses analisis yang dilakukan bank dilakukan secara berulang-ulang dimulai dari unit bisnis sampai dengan direksi dan para pemangku

kepentingan hal ini dilakukan agar pembiayaan yang disalurkan pihak bank berjalan dengan baik sampai dengan pelunasan kembali. Prinsip kehati-hatian bank syariah dalam pemberian pembiayaan memperhatikan:

⁸⁶

a. Prinsip Dasar Pemberian Pembiayaan

Prinsip dasar pemberian pembiayaan adalah bank harus memerhatikan ketentuan pokok regulator serta prinsip syariah, bank melakukan hubungan dengan debitur yang memiliki karakteristik baik serta memiliki integritas dan tanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban, bank tidak diperkenankan mengorbankan kualitas pembiayaan semata-mata karena target, keuntungan tinggi, gengsi dan kepentingan pribadi, bank tidak memberikan pembiayaan diluar kemampuan supervisi dan monitoring pembiayaan tersebut, bank diutamakan memberikan pembiayaan dengan valuta yang sama dengan valuta sumber pengembalian, bank harus melakukan pemeriksaan atas data-data nasabah yang diberikan kepada bank, selanjutnya keputusan pemberian didasarkan atas permohonan dan evaluasi tertulis baik kualitatif maupun kuantitatif.

b. Prinsip Pemisahan Fungsi (*Four-Eye Principle*)

Pemisahan Fungsi diartikan sebagai setiap orang dalam jabatan tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan dan menyembunyikan penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya pada semua jenjang organisasi dan langkah kegiatan operasional.

c. Prinsip *One Obligor*

Prinsip *one obligor* pada dasarnya risiko satu debitur mempengaruhi risiko yang tergabung

⁸⁶ Marzuki, Achmad, dkk, Kebijakan Pembiayaan, (Jakarta: PT Bank Syariah Mandiri, 2012), hal 15-20

dalam kelompok usaha, risiko satu debitur dipengaruhi oleh risiko grup secara keseluruhan dan sebaliknya, satu dari beberapa tujuan pelaksanaan prinsip *one obligor* ialah fasilitas pembiayaan yang ditawarkan tidak melampaui BMPK untuk menentukan strategi penanganan *account* yang akan ditetapkan bagi debitur dalam suatu grup debitur.

d. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT)

Unit kerja pembiayaan pemroses pembiayaan harus melakukan *customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD). Hal ini untuk memastikan pembiayaan yang diajukan sesuai dengan profil calon nasabah sehingga mitigasi risiko menjadi optimal.

e. Prinsip Penyediaan *Self Financing*

Prinsip *self financing* adalah penyediaan dana sendiri yang besarnya ditetapkan oleh bank dalam pemberian fasilitas pembiayaan.

f. Prinsip Penetapan Kualitas Aktiva Produktif

Bank menetapkan kualitas dan klasifikasi pembiayaan sesuai ketentuan BI yang berlaku, kualitas pembiayaan (tunai dan no tunai) dibedakan sesuai ketentuan BI (lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet), penetapan aktiva produktif diatur sesuai dengan kualitas pembayaran.

g. Prinsip Pengawasan Pembiayaan

Penjabat dan pengawasan unit kerja pembiayaan harus dengan aktif dan konsisten melakukan pengawasan pada agar bank dapat cepat mengambil langkah pencegahan dan perbaikan untuk menghindari penurunan kualitas pembiayaan nasabah.

h. Prinsip Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Bank mendeteksi secara dini pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pemicu permasalahan pada pembiayaan, bank melakukan pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, bank mengupayakan pembiayaan bermasalah, diragukan, kurang lancar dan macet dibawah 5%.

3. Tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Standar *Asset Protection Lending Rationale* di Bank Syariah

Otoritas jasa keuangan yang mengatur, mengawasi dan melindungi secara khusus tidak mengeluarkan aturan secara khusus mengenai penerapan *Asset Protection Lending Rationale* pada pembiayaan di perbankan syariah Indonesia. Namun untuk mengatur, mengawasi dan melindungi kegiatan operasional usaha pada bank syariah agar bank syariah tidak membuat kesalahan dalam penyaluran pembiayaan dan mengalami risiko dari pembiayaan yang disalurkan. Maka, OJK hanya melakukan pengawasan dengan berdasarkan peraturan turunan dari Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Menimbang :⁸⁷

- a. Bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank.
- b. Bahwa karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.
- c. Bahwa langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam memitigasi risiko harus

⁸⁷ PBI Nomor 13/23/PBI/2011

mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah.

- d. Bahwa pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan diatas masih berkenaan dengan *Asset Protection Lending Rationale* karena merupakan cara dari mengatasi risiko. Selama *Asset Protection Lending Rationale* yang dijalankan bank syariah dapat membantu dalam mengurangi potensi risiko yang terdapat di bank syariah maka bank dalam melaksanakannya terlebih didukung dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 35 yang menetapkan bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, juga pada pasal 23 yang menetapkan bahwa :

- a. Bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
- b. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Achmad, Marzuki, dkk. 2012. *Kebijakan Pembiayaan*. Jakarta: PT Bank Syariah Mandiri.
- Al Arif, Nur Rianto dan Yuke Rahmawati. 2018. *Manjemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali, M. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Antoni, M. Syafi'. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Azwar, Safidin. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jusuf, Jopie. 2014. *Analisis Kredit untuk Credit (Account) Officer*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Meleong , L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhammad. 2016. *Manjemen Pembiayaan Bank Syariah* . Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Karim, A. diwarman. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keterangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, edisi revisi*. Jakarta: PT Raja grafindo persada.

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakata: Ar-Ruzz Media.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Suyanto, Thomas, dkk. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Tay, Kenny. 2016. *Corporate and Bussiness Lending: Setting the Standars*. Singapore: Partridge Publishing Singapore.

Wahyudi, Imam, dkk. 2013 *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

Yaya, Rizal, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Alfianila, dkk. 2018. "Implementasi Asset Protection Lending Rationale Pada Pembiayaan Korporasi Di Bank Syariah". Vol.4. No 1.

Brkic, Sabina, dkk. 2017. "Fuzzy Logic Model Of Soft Data Analysis For Corporate Client Credit Risk Assessment In Commercial Banking".

Fatimah. 2018. *“Pengaruh Analisis Kredit dan Pengawasan Kredit Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Dana Nagoya Di Kota Batam”*. Vol. 1. No. 1.

Miti, Yarmunida. 2018. *“Dimensi Syariah Compliance pada Operasional Bank Syariah”*. AL-INTAJ Volume 04 Nomor 01.

Purnamasari. A. Eka , Musdholifah. 2016. *“Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015”*. Vol. 9. No. 1.

Qodar, Lailani. 2016. Skripsi: *“Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Loan) PT Bank Mandiri Syariah”*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.

Rahmawati. A. Tricesnaning Rahmawati, dkk. 2016. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) *“Analisis Keputusan Pemberian Kredit Dalam Langkah Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi kasus pada Kredit Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk unit Slawi 1, Kab Tegal Jawa Tengah)”*. Vol. 35 No. 1.

Rangkuti, Tavitri. 2018. *“Pengaruh Analisis Kredit Terhadap Rangkuti, Tavitri “Pengaruh Analisis Kredit Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani Cikarang, Jawa Barat”*. Vol. 1, No. 1.

Ace-grup. 2020. *Bankers Guide to Secure Lending*. (http://www.ace-group.net/Downloads/Lending_Rationale.pdf). Diakses pada 15 Januari 2021, 19.00.

Bank Mandiri Syariah. 2016. *“Annual Report”*. (<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>). Diakses pada 21 April 2020, pukul 19.30.

Bank Mandiri Syariah. 2017. *"Bank Mandiri Syariah Tentang Kami"*, (<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>), Diakses pada 7 Oktober 2020, pukul 16.00.

CIMB Niaga. 2020. *Trust Reciept*, (<https://www.cimbniaga.co.id/id/business/layanan/trade-finance/import-trades-at-cimb/trust-receip>). Diakses pada 17 Januari 2021, 19.00.

International Banking Operations. 2014. *Account Receivable Financing*, (<https://ibankingops.wordpress.com/2014/07/06/29/>). Diakses pada 16 Januari 202, 21.00.

Irc Blog. 2011. *"Jenis-Jenis Kredit"*. (<https://ircboy.wordpress.com/2011/07/21/iii-2-jenis-jenis-kredit/>). Diakses pada 02 September 2020 pukul 13.00.

Kontan.co.id. 2020. *"Ini sektor kredit Bank Mandiri dan BRI yang berpotensi memburuk akibat virus corona"*. (<https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-sektor-kredit-bank-mandiri-dan-bri-yang-berpotensi-memburuk-akibat-viruscorona>). Diakses pada 8 September 2020 pukul 19.55.

Kata data. 2020 *"Imbas Corona, Tiga Perusahaan Retail Besar Merugi Ratusan Miliar"*. <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/imbas-corona-tiga-perusahaan-retail-besar-merugi-ratusan-miliar>". Diakses pada 10 April 2021 PUKUL 21.00

Risca Vilana. 2020. *"Strategi Mandiri Syariah Jaga Kualitas Pembiayaan"*. (<https://infobanknews.com/topnews/strategi-mandiri-syariah-jaga-kualitas-pembiayaan/>). Diakses pada 7 September 2020 pukul 15.37.

Wikipedia. 2020. *Resi Gudang*. (https://id.wikipedia.org/wiki/Resi_gudang). Diakses pada 17 Januari 2021, 13.00.

Wikipedia.2020. *Anjak Piutang*. (https://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang) Diakses pada 17 Januari 2021, 19.30.

Asy-Syifa. 2012. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Raja Qur'any.

DSN-MUI. 2000. *Pembiayaan Mudharabah NO: 07/DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional.

DSN-MUI. 2000. *Pembiayaan Musyarakah NO: 08/DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional.

PBI Nomor 13/23/PBI/2011

Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008

